KONSEP PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL-AFGHANI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan

Memenuhi Syarat-Syarat Skripsi

Oleh :

ANITA ZAM'ARINI

NIM : 0404163026

PROGRAM STUDI : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

MEDAN

2021

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

KONSEP PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL-AFGHANI

Oleh :

ANITA ZAM'ARINI

NIM : 0404163026

Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 (S.1) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushulludin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan

Pembimbing I

Drs. Musaddad Lubis,M.Ag
NIP : 195612121983031004

Pembimbing II

Drs. Muhammad Aswin, MAP
NIP: 196808172003121003

SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang Ditugaskan Untuk Membimbing Skripsi dari Mahasiswa :

Nama	: Anita Zam'arini
Tempat/Tgl.Lahir	: Bandar Pasir Mandoge, 22 Juli 1998
NIM	: 0404163026
Jurusann	: Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi	: Konsep Pemerintahan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku yang selanjutnya dapat dimunaqasyahkan.

Medan, 28 Desember 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Musaddad Lubis,M.Ag	**Drs. Muhammad Aswin, MAP**
NIP : 195612121983031004	**NIP: 196808172003121003**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Anita Zam'arini
NIM	: 0404163026
Fakultas	: Ushuluddin dan Studi Islam
Jurusan/Prodi	: Pemikiran Politik Islam
Tempat/Tgl.Lahir	: Bandar Pasir Mandoge, 22 Juli 1998
Alamat	: Dusun IX Bandar Pasir Mndoge

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : ***"Konsep Pemerintahan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani"*** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tangung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 28 Desember 2020

Yang membuat pernyataan

ZAM'ARINI

NIM : 0404163026

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "KONSEP PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL-AFGHANI)" an. ANITA ZAM'ARINI, NIM 0404163026, Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S-1) Fakultas Ushuluddin dan Studi IslamUIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 2 Maret 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 2 Maret 2021

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI PROGRAM SARJANA (S-1) FAK. USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Ketua

Drs. Abu Syahrin, M.Ag
NIP. 19671027 200003 1 002

Sekretaris

Dr. Aprilinda M. Harahap, S.Ag
NIP. 19740412 201411 2 001

Anggota Penguji

Drs. Musaddad Lubis.M.Ag
NIP : 19561212 198303 1 004

Drs. Muhammad Aswin, MAP
NIP: 19680817 200312 1 003

Dr. Mardian Idris Harahap, M.Ag
NIP. 19770718 200501 1 008

Dr. Junaidi, S.Pd. M.Si
NIP. 19810102 200912 1 009

Mengetahui:
DekanFak. UshuluddinDnStudi Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. Amroeni Drajat, M. Ag
NIP. 19650212 199403 1 001

Nama : Anita Zam'arini

Nim : 0404163026

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam

Jurusan : PemikiranPolitik Islam

Pembimbing I : Drs. Musaddad Lubis, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Muhammad Aswin, M.AP

JudulSkripsi : Konsep Pemerintahan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani

ABSTRAK

Jamalaludin Al-Afghani merupakan tokoh pembaharuan dalam Islam abad kesembilan belas. Untuk memperkuat posisi umat Islam secara politis, Al-Afghani mengembangkan konsep pendidikan secara totalitas supaya warga tidak diperlakukan secara diskriminatif, maka konsep pendidikan yang dikembangkan adalah gerakan salafiyah yang pernah diajarkan oleh generasi terdahulu. Pan Islamisme yang digagas bertujuan untuk memberi rasa keadilan kepada warga supaya ikatan solidaritas dapat tercapai sehingga eksistensi dan dan kemandirian suatu Negara dihormati dan dihargai oleh Negara lain.

Al-Afghani sangat mencela konsepsi Negara yang berprinsip otokhratis dan berpaham bahwa raja mempuanyai kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Pemimpin harus mengambil keputusan secara musyawarah dengan melibatkan masyarakat dalam keputusan itu supaya kebebasan mengeluarkan pendapat dan kewajiban kepala Negara untuk tunduk terhadap Undang Undang dapat terlaksana. Naturalisme dan materialisme beragama bagi Al-Afghani tidak lebih hanya sekedar asumsi sehingga dapat mengarahkan umat Islam untuk berpikir kebendaan. Maka semangat dalam menjalankan ajaran Islam harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sehingga peluang untuk melakukan ijtihad tidak diwarnai dengan saling menyalahkan antara satu pedapat dengan pendapat yang lain.

Metode penelitian yang bersifat kualitatif, yang mana peneliti menganalisis dari setiap fenomena sosial. Tujuan dari penelitian ini melainkan untuk mengetahui bagaimana konsep pemerintahan yang pantas dan yang baik dilakukan untuk masyarakat muslim.

Kata Kunci : *Pemerintahan, Jamaluddin Al-Afghani, Politik*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***"Konsep Pemerintahan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani''*** dan dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang menjadi inspirasi dalam kegiatan keislaman. Semoga kelak kita termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin.

Proposal skripsi ini disusun secara sistematis guna untuk memenuhi syarat dalam pengajuan judul skripsi. Penyusunan Proposal skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril dan spritual dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat atas segala bimbingan, pengarahan, serta dorongan yang telah diberikan kepada penulis dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Syahrin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

2. Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam beserta Wakil Dekan I, II, III dan seluruh jajaran Civitas Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.

3. Drs. Aswin, M.Ap., selaku Ketua Jurusan Program Studi Pemikiran Politik Islam serta Muhammad Hidayat,M.A., selaku Seketaris Jurusan Program Studi Pemikiran Politik Islam.

4. Dr. Safria Andy, MA selaku dosen pembimbing Seminar Proposal yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi.

5. Drs. Musaddad Lubis, M.Ag selaku Dosen Pembimbing pertama, terima kasih atas bimbingan, arahan serta keluangan waktu dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

6. Drs. Aswin, M.Ap selaku Dosen Pembimbing kedua, terima kasih atas masukan, arahan, serta bimbingan yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Bapak/Ibu dosen Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang telah memberi ilmu dan sumbangan berupa saran serta materi selama perkuliahan kepada penulis.

8. Ayahanda (Sugondo) dan Ibunda (Siti Zainab) tercinta, yang telah mengalirkan doa dan tidak pernah berhenti memberi dukungan serta mengukir semangat pantang menyerah dalam jiwa, memberikan perhatian dan kasih sayang yang begitu tulus dalam menjaga, merawat, dan membesarkanku selama ini, serta tak lupa juga Zahra Safira dan Ahmad Al-Khofadi selaku Adik.

9. Abangda Fachri Pradana, selaku senior dalam pergerakan. Terimakasih telah membantu dan mensupport saya dalam berbagai hal.
10. Teman-teman Stambuk 2016 Jurusan Pemikiran Politik Islam yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih banyak atas dukungan dan kekompakanya selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh Karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penulisan selanjutnya dan penulis berharap proposal skripsi ini berguna bagi penulis serta pembaca dan bermamfaat bagi semua orang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 28 Desember 2020

Penulis,

Anita Zam'arini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 4

D. Metode Penelitian 5

E. Penelitian Terdahulu 7

F. Landasan Teori 9

G. Sistematika Penulisan 23

BAB II BIOGRAFI JAMALUDDIN AL-AFGHANI

A. Biografi Jamaluddin Al-Afgani 24

B. Ide Pembaruan Jamaluddin Al-Afghani 30

C. Usaha Pembaruan dan Karya Jamaluddin Al-Afghani 34

BAB III PEMIKIRAN JAMALUDDIN AL-AFGHANI

A. Gagasan Politik Jamaludiin Al-Afghani 38

B. Wacana Pan-Islamisme 41

C. Konsep Negara 45

D. Naturalisme dan Materialisme 48

E. Pemikiran Modernisasi..... 50

F. Pemerintahan Menurut Jamaluddin Al-Afghani 53

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN JAMALUDDIN AL-AFGHANI TENTANG PEMERINTAHAN

A. Bentuk Negara dan Pemerintahan Menurut Jamaluddin Al-Afghani..... 54

B. Pengaruh dari Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani Terhadap Pemerintahan di Era Modern 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang diberikan kekuasaan untuk mengatur seluruh kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan pemerintahan merupakan orang-orang yang melakukan proses, cara, ataupun perbuatan dalam memerintah. Lembaga-lembaga pemerintah umumnya dibentuk untuk menjalankan segala aktivitas pelayanan bagi masyarakatnya.

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata *"pemerintah"* yang berarti melakukan pekerjaan secara menyeluruh. Penambahan kata awalan *"pe"* merupakan suatu bentuk badan yang memiliki kekuasaan dalam memerintah. Penambahan kata akhiran *"an"* berarti sebuah bentuk perbuatan atau cara, dan segala urusan-urusan didalam memerintah.[1]

Sistem pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setiap lembaga pemerintah memiliki peran dalam memimpin negara, mengatur, menegakkan hukum serta bertanggungjawab dalam mensejahterakan rakyatnya. Tujuannya untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan, kualitas pendidikan yang baik, serta kesejahteraan rakyat. Lembaga pemerintahan juga sebagai penampung aspirasi rakyat untuk memperbaiki ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada rakyat disetiap

[1] Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hajsmy*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar : 2017)h.114

daerah. Setiap keputusan pemerintah merupakan bentuk nilai bagaimana kemajuan negara tersebut kedepannya.

Sistem pemerintahan yang diterapkan didalam setiap negara berbeda-beda, sebab latar belakang terbentuknya negara-negara tersebut juga memiliki perbedaan. Sistem pemerintahan yang dibentuk juga merupakan sebuah proses, dimana negara tersebut memiliki keputusan untuk sebuah pencapaian terbaik dinegaranya. Walaupun tidak dipungkiri lagi didalamnya juga memiliki persaingan untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan dan faktor kepentingan.

Sistem pemerintahan dalam Islam berbeda dengan sistem pemerintahan lainnya. Perbedaan tersebut meliputi dasar pemerintahan, bentuk pemerintahan, struktur pemerintahan, dan sebagainya. Sistem pemerintahan Islam merupakan sistem pemerintahan yang menggunakan Alquran dan Sunnah sebagai acuan dalam segala aspek kehidupan, seperti landasan hukum dan segala aspek kehidupan bernegara. Dasar negara berasal Al Quran dan Sunnah. Kepala negaranya disebut Khalifah.

Para pemimpin dan staf pemerintahannya adalah orang-orang baik, bertanggung jawab, jujur, amanah, adil, faham Islam, berakhlak mulia dan bertakwa. Seperti didalam Q.S An-Nur ayat 55 sebagai berikut :

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

Artinya : *"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik."*

Sistem pemerintahan di Indonesia sendiri adalah presidensial. Dimana kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. Presiden juga dibantu oleh para menteri dalam menjalankan berbagai tugas kenegaraan. Pemerintah Indonesia mengambil bentuk demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah kehidupannya.

Setiap keputusan dalam undang-undang dibentuk dengan mengadakan rapat kabinet negara. Tujuannya agar setiap undang-undang bisa diperhatikan. Hukum merupakan salah satu bentuk landasan hukum di Indonesia. Segala aturan yang terdapat dalam undang-undang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, oleh karena itu dapat

dimaklumi apabila ada keinginan dalam penyusunan hukum nasional Indonesia yang sumber hukumnya berdasarkan Al-Quran, As -Sunnah dan Al-Ijtihad.[2]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan sebagai berikut : "Bagaimana Konsep Pemerintahan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani?"

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari skirpsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui lebih dalam tokoh Jamaluddin Al-Afghani semasa hidupnya.
2. Untuk memperjelas kembali bagaimana bentuk-bentuk pemerintahan yang sesuai dengan umat Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana umat Islam diperlakukan ketika di bawah kekuasaan Barat pada masa itu.

Adapun beberapa kegunaan yang dapat kita ambil yaitu sebagai berikut:

1. Menambah wawasan baru tentang bentuk-bentuk pemerintahan pada masa kerajaan maupun pada masa kejayaan bangsa Barat.
2. Menambah pengetahuan tentang pengaruh besar Jamaluddin Al-Afghani terhadap Islam.

---

[2]K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,(Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas, 1995)h.10

D. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilakukan oleh sekelompok peneliti di bidang ilmu sosial, termasuk pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan, intinya penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metode yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini, peneliti membuat gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan rinci tentang pandangan responden dan melakukan studi tentang situasi alam.[3]

Penelitian kualitatif digunakan ketika masalah tidak jelas, mencari makna tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan menelaah perkembangan sejarah. Mengingat penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana pemikiran politik menurut Jamaluddin Al-Afghani akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan *Moleong*, metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan dengan beberapa realitas; kedua, metode ini memberikan

[3]Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Gaung Persada, 2009)h. 11

hubungan langsung antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih sensitif dan lebih mampu beradaptasi dengan banyaknya penajaman pengaruh bersama dan pola nilai yang dihadapi.[4]

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mendeskripsikan kondisi subjek atau objek dalam penelitian, dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain yang saat ini berdasarkan kasat mata atau fakta sebenarnya.

c. Sumber Data

Penelitian ini bersumber data yakni sumber data sekunder dan sumber data primer yang dilakukan oleh penulis. Sumber data primer merupakan karya dari buku yang menjelaskan tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Adapun sumber data sekunder merupakan kesamaan literatur yang dikutip dari buku-buku lain baik maupun dari jurnal, internet dan tokoh lain pendapatnya tentang sosiologi politik.

d. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka. Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku atau karya-karya yang bersangkutan untuk menyelidiki hasil karya orang lain dengan topik yang diteliti.

E. Penelitian Terdahulu

[4] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)h.5

Penelitian terdahulu dijelaskan sebagai bahan perbandingandan juga acuan dalam penelitian skripsi selanjutnya. Hal ini dilakukan agr menghindari adanya palagiarisme dengan penelitian ini. Maka dengan ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Noorthaibah (2015)

   Penelitian Noorthaibah (2015), berjudul "*Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani : Studi Pemikiran Kalam Tentang Takdir".* Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kulitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang gerakan pembaharuan yang diciptakan Jamaluddin Al-Afghani dalam membangkitkan umat Islam sesuai dengan pemikiran kalam modern yang ia ciptakan.

   Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Jamaluddin Al-Afghani tidak menyatakan dirinya sebagai menganut dan pendukung salah satu aliran dari beberapa aliran kalam, namun dalam pemikiran kalam menurut pandangan penulis dia ada kecendrungan pada metode salaf, yakni lebih mengutamakan dan mendahulukan dasar naqli daripada dasar akli (rasio). Al-Afghani berpendapat bahwa dalil naqli (Al-Qur'an dan hadis) tidak bertentangan dengan akal apabila terjadi pertentangan maka dilakukan reinterprestasi terhadap interprestasi lama, dengan tidak menghilangkan subtansi yang terkandung dalam dalil naqli. Sehubungan dengan itu menyatakan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka ia berpendapat bahwa untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang umat Islam harus kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis.

2. Hasil Penelitian Akmal Hawi (2017)

Hasil penelitian Akmal Hawi (2017), berjudul *"Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani (Jamal Ad-Din Al-Afghani) (1838-1897M)*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dicetuskan dan digunakan.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jamaludin Al-Afghani, adalah salah seorang tokoh reformis Islam yang memiliki ide-ide kreatif dalam mengembalikan semangat juang umat Islam, terutama dalam hal menentang penjajahan negara Barat modern dan melenyapkan sikap taklid dikalangan umat, dimana sikap ini telah membelenggu pola pikir rasional umat. Jamaludin Al-Afghani lebih dikenal sebagai politikus muslim dari pada sebagai tokoh pembaharu negara. Kegiatan politiknya yang terbesar dilakukan di Mesir, yaitu lebih kurang 8 tahun (1871-1876 M). Sehingga menjadikan ia sebagai bapak Nasionalisme Mesir.

Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan skripsi ini yaitu dari segi sudut pandangnya. Skripsi ini ditulis berdasarkan sudut pandang pemikiran politiknya dalam pemerintahan. Sedangkan penelitian sebelumnya berdasarkan ilmu kalam dan pemikirannya saja.

F. Landasan Teori

a. Pengertian Konsep

Menurut Bahri (2008: 30) konsep merupakan satuan makna yang merepresentasikan sejumlah benda yang memiliki ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu membuat abstraksi terhadap objek yang dihadapinya, sehingga objek tersebut ditempatkan dalam kelompok tertentu. Objek disajikan dalam kesadaran masyarakat dalam bentuk representasi mental tanpa kekuatan apapun. Konsep itu sendiri juga dapat direpresentasikan dalam bentuk kata.

Menurut Soedjadi (2000: 14) konsep adalah gagasan abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau menggolongkan yang umumnya diekspresikan dengan istilah atau rangkaian kata. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu konsep adalah suatu gagasan atau gagasan yang tersusun dari kata-kata yang mempunyai makna dan objek.

b. Pemerintahan

Pemerintahan merupakan sebuah bentuk ketatanegaraan, dimana setiap lembaga didalamnya memiliki tugas masing-masing dalam mengatur negara. Lembaga pemerintahan sangat berpengaruh besar dalam kemajuan dan perkembangan negara, baik dibidang ekonomi, kesejahteraan maupun keamanan yang dimiliki setiap warga negaranya.

Menurut Muh. Kusnardi, pemerintahan merupakan segala bentuk urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan mesejahteraan dan kepentingan rakyatnya. Pemerintahan tidak hanya menjalankan tugas eksekutif, tetapi juga mencakup tugas-tugas lain, seperti legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan merupakan sebuah gejala sosial, yang artinya terjadi di dalam masyarakat, sebuah hubungan antara anggota masyarakat, baik antar individu, antar kelompok, maupun hubungan antara individu dengan kelompok. Gejala seperti ini akan terus terjadi di dalam masyarakat. Dari sini akan terlihan mana masyarakat yang lebih dominan dalam berinteraksi dan memiliki pengaruh besar terhadap orang di sekitarnya.

Dengan beberapa definisi pemerintahan tersebut, untuk lebih memahaminya, berikut adalah pendapat para ahli mengenai arti pemerintahan yang sebenarnya:

1. Menurut Suradinata

Menurut Suradinata, pemerintahan diartikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan besar di suatu negara, baik dalam bidang kewilayahan, kemasyarakatan, maupun kekuasaan lainnya, untuk mencapai tujuan negara.

2. Menurut Affan

Pengertian pemerintahan menurut Affan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh seseorang atau warga negara di suatu negara tertentu, berdasarkan kedaulatan negara dan bersumber dari atas dasar negara, untuk mencapai tujuan rakyat atau warga negara. di area itu sendiri.

3. Menurut Wilson

Menurut Wilson, yang dimaksud dengan pemerintah adalah kekuatan organisasi yang tidak selalu terkait dengan organisasi angkatan bersenjata, tetapi kepada dua atau lebih kelompok orang yang berasal dari semua golongan masyarakat dan diorganisir oleh suatu organisasi, untuk mewujudkannya. maksud

dan tujuan yaitu dengan memberikan perhatian yang luas terhadap urusan kemasyarakatan.

4. Menurut Ndraha

Ndraha, mengartikan pemerintah sebagai setiap aparatur negara atau lembaga negara yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

5. Robert Mac Iver

Sedangkan pengertian pemerintahan menurut R. Mac Iver adalah organisasi yang bersumber dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, tentang bagaimana manusia dapat diatur. Dengan demikian pengertian pemerintahan adalah suatu proses atau cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan menjalankan kewenangannya dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain, dalam rangka penyelenggaraan segala urusan negara untuk kesejahteraan rakyat. masyarakat luas.

Max Weber menelusuri hal-hal yang lebih dominan dalam berinteraksi di masyarakat dari sudut Sosiologinya dalam membentuk pemerintahan, berikut beberapa data yang disebutkan:

1. Waktu ; dimana orang yang lebih tua akan lebih dominan terhadap yang lain. Ini disebabkan orang yang lebih tua memiliki waktu yang lebih lama dibanding orang lain.
2. Lokasi ; sebuah tempat ataupun lingkungan sangat berpengaruh, yang mana jika masyarakat memiliki lingkungan yang baik, maka interaksi yang didapat juga akan baik. Begitu sebaliknya, jika lingkungan tersebut tidak baik, maka interaksi yang terjalin tidak akan maksimal atau kurang baik.

3. Tradisi ; disetiap lingkungan masyarakat pasti memiliki sebuah tradisi. Tradisi tersebut yang membuat ikatan antar masyarakat terjalin sangat kuat.
4. Penakhlukan ; kelompok penakhluk akan lebih dominan, baik dengan menggunkan kekuatan atau yang lain sebagainya.
5. Penyelesaian konflik ; konflik-konflik yang terjadi akan diselesaikan melalui proses *win-lose* atau *lose-win.*
6. Perlombaan atau persaingan.
7. Kesepakatan ; kesepakatan ditentukan oleh sekelompok orang dengan tujuan atau kepentingan bersama.

Pemerintahan sendiri merupakan jenis alat ataupun juga dapat disebut sebagai aparatur pemerintahan yang memiliki tigas untuk mengontrol dan mengarahkan suatu negara. Setiap pemerintahan juga memiliki cara tersendiri dalam mengatasi bebagai masalah kenegaraan dengan menentukan hukum-hukum yang berlaku. Contohnya daam permasalahan ideologi, politik, ekonomi, budaya dan masalah penegakkan hukum yang lainnya.

Sebuah permasalahan di suatu negara tidak akan dapat terselesaikan apabila salah dalam mengartikan ataupun menggunakan jenis pemerintahan itu sendiri. Secara garis besar, jenis pemerintahan yang dapat menyelesaikan masalah negara seperti di atas. Kalau rakyat bisa ikut menjalankan pemerintahan jenis ini sesuai fungsinya. Sampai saat ini, hanya sedikit negara yang menerapkan good government seperti ini. Secara sempit, pemerintahan jenis ini hanya sebagai alat

untuk menjalankan roda pemerintahan agar stabilitas negara tetap terjaga. Dan sebagai tameng dari para aktor reaksioner dan radikal rakyat itu sendiri.

Pemerintah merupakan sebuah perkumpulan atau sekelompok orang atau dapat juga berupa organisasi, yang mana mereka diberikan kekuasaan penuh dalam mengatur serta memiliki kewenangan dalam penerapan undang-undang ataupun hukum di berbagai wilayah dan negara tertentu. Yang artinya, pemerintah merupakan badan atau lembaga publik yang memiliki tugas dalam mewujudkan tujuan negara sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Tugas-tugas ini biasanya dilakukan oleh penyelenggara kepemimpinan atau pemerintahan, pembina masyarakat maupun koordinasi dari pemerintahan dari seluruh lembaga yang ditempati.

Pengertian lain dari pemerintah yaitu merupakan sebuah perangkat negara, baik dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga bidang ini bertugas dalam mengatur dan melaksanakan sistem pemerintahan. Dalam pegertian yang sempit pemerintah biasa diartikan sebagai badan eksekutif. Pemerintahan juga diartikan sebagai badan yang memiliki rugas, kegiatan, fungsi, serta kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam bernegara.

Sedangkan dalam arti yang lebih luas dalam hal ini pemerintahan adalah segala kegiatan yang bersumber dari kemerdekaan dan kedaulatan yang dilandasi oleh negara yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila, rakyat atau kependudukan, serta wilayah yang ada di negara tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Mengacu pada pengertian pemerintahan maka dapat ditarik garis besar bahwa terdapat 4 fungsi pokok pemerintahan. Yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan Fungsi

Fungsi pemerintah yang pertama adalah mengatur atau mengatur. Dalam hal ini, pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai fungsi pokok yaitu membuat peraturan perundang-undangan guna mengatur hubungan manusia-manusia dalam masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih dinamis dan harmonis.

2. Fungsi Layanan

Selain itu, pemerintah juga memiliki fungsi pelayanan. Dimana secara umum pelayanan ini mencakup pelayanan publik dan pelayanan sipil yang bertumpu pada mengedepankan kesetaraan. Beberapa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat meliputi urusan luar negeri, peradilan, agama, keuangan, keamanan dan pertahanan.

3. Fungsi Pengembangan

Sedangkan dalam menjalankan fungsi pembangunan, pemerintah perlu melakukan berbagai pembangunan di seluruh pelosok tanah air, baik di pusat maupun di daerah. Dimana yang dimaksud pembangunan disini tidak hanya sekedar melakukan pembangunan infrastruktur, tetapi juga melaksanakan pembangunan mental spiritual warga.

4. Fungsi pemberdayaan

Sedangkan fungsi pemberdayaan untuk mendukung otonomi daerah masing-masing, agar dapat mengelola daerahnya sesuai dengan sumber daya yang tersedia

secara optimal. Selain itu, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya pemerintah daerah perlu meningkatkan peran publik atau swasta dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan.

Dalam bahasa Inggris, pemerintahan disebut juga dengan government, yang artinya mengendalikan, sehingga pada awalnya lambang dari sebuah pemerintahan yaitu berbentuk kapal. Peristiwa di dalam pemerintahan dapat dipelajari atau dipahami dengan menggunakan metodologi reseach yang mana hasilnya dapat diajarkan, diwariskan, dan diterapkan.[5]

Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan secara mendalam dalam Islam terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami masing-masing orang. Dalam rentang waktu yang sangat lama dari abad ke-7 hingga Masehi hari ini, Muslim telah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan kekhalifahan (kekhalifahan berdasarkan syura dan khilafah monarki), imamah, monarki dan demokrasi.

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh wilayah, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatannya adalah pemersatu kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada dasarnya, Khilafah adalah kepemimpinan umum yang bertanggung jawab atas agama dan menyatakan sebagai wakil Nabi. Di Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum untuk semua Muslim di dunia untuk menegakkan hukum Islam dan melaksanakan dakwah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan kekhalifahan adalah kewajiban bagi semua Muslim di seluruh dunia. Laksanakan

[5] Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Ilmu Pemerintahan,* (Jakarta, PT. RINEKA CIPTA : 2014) h.5-6

kewajibannya dengan demikian, sama dengan menjalankan kewajiban yang diminta oleh Allah atas semua Muslim. Mengabaikan pendirian Khilafah adalah amoralitas (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling menyakitkan.[6]

Dengan sub judul ini, pemerintahannya yaitu pemerintahan dalam perspektif Islam tentunya pembahasan dengan melihat pemerintahan pada zaman Nabi Muhammad SAW (negara bagian Madinah). Dalam hubungan ini, menurut Mohammed S. Elwa bahwa setiap orang terlibat dalam penelitian tentang prinsip-prinsip sistem Politik Islam dan sejarahnya, harus menerimanya Rasulullah Saw adalah orang pertama yang membentuk pemerintahan Islam, setelah pindah dari Mekah ke Madinah.[7]

Nabi Muhammad SAW atau juga dapat dikatakan sebagai kepala negara yang melaksanakan tugasnya dengan tidak memusatkan pada diri sendiri. Dalam *Piagam Madinah* menyatakan sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi meskipun pada saat itu orang tidak mengenal perpisahan atau distribusi kekuasaan, tetapi dalam praktiknya dia mendelegasikan tugas eksekutif dan yudisial kepada teman-teman yang berbicara dengan kompeten.[8]

Adapun bentuk-bentuk pemerintahan yang digunakan diberbagai negara adalah sebagai berikut :

---

[6]Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2008) h. 204-205

[7]Mohammed S. Elwa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Terj. Anshori Thayib,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983) h. 19

[8]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)h. 97

1. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat perdana menteri dan parlemen dapat menggulingkan pemerintahan, dengan mengeluarkan kudeta. Berbeda dengan sistem presidensial, di mana sistem parlementer dapat memiliki presiden, presiden, dan perdana menteri, yang memiliki kewenangan atas jalannya pemerintahan. Di kantor kepresidenan, presiden memiliki kewenangan atas jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi lambang kepala negara.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat. Sedangkan landasan hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan umum. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk asisten yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat atau tidak membutuhkan dukungan amanah dari badan perwakilan rakyat, para menteri tidak bisa diberhentikan olehnya.

3. Sistem Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan dimana warga negara memiliki kewenangan dan hak yang sama dalam hal pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupannya. Sistem demokrasi memberikan

kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya dalam perumusan, pengembangan dan penyusunan undang-undang. Demokrasi memungkinkan kebebasan politik.

4. Sistem Republik

Republik adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara adalah presiden. Namun, republik berbeda dengan konsep demokrasi. Ada kasus di mana republik diperintah dengan cara totaliter. Republik berbeda dengan monarki, tetapi yang membedakannya bergantung pada penguasa eksekutif negara itu sendiri.

c. Politik

Di dalam bahasa indonesia politik berarti segala urusan atau tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah. Jadi, politik adalah cara dan upaya dalam menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi manusia.[9]

Politik, Menurut bahasa Yunani, berasal dari kata *politea* atau *politicos* yang berakar dari kata Polis. Kurang lebih dapat diterjemahkan dengan kata "kota" atau lebih tepatnya "negara-kota". Banyak kata yang menerjemahkan *politeis* sebagai negara, *the state* dalam bahasa inggris, *de staat* dalam bahasa dan Belanda, *der staat* dalam bahasa Jerman.[10]

[9]Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali,1988).h.11-12
[10]W.J.S.Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 2010)h. 245

Politik dalam bahasa arab berarti *siyasah* yang berarti mengurus dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Menurut al-Maqrizi sebagaimana dikutip Abdul Wahab khallaf arti kata siyasah adalah mengatur. Secara terminologis, *siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa pada kemashlahatan. Siyasah berkaitan dengan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan menjauhkanya dari kemudharatan.

Abdul Wahab Khallaf mengartikan siyasah sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan menghindari kerugian dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip umum syariah, meskipun tidak sesuai dengan Imam mujtahid. Sedangkan menurut Abdul Rahman siyasah adalah hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengatur urusan masyarakat yang sejalan dengan semangat syariat dan sesuai dengan prinsip universal untuk mewujudkan tujuan sosial.[11]

Definisi tersebut menegaskan bahwa kewenangan membuat segala peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan publik guna mewujudkan kemanfaatan umum ada pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Oleh karena itu, segala bentuk hukum siyasah, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa bersifat mengikat. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan politik sebagai berikut:

1. Ibnu Qayim

[11] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h.24

Politik merupakan kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan dri dari kerusakan. Siyasah dalam Ibnu Qayim *siyasah* yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan dan syariat.

2. Abdul Qadim Zallum

Politik adalah mengatur urusan umat, dengan negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi melakukan muhasabah terhadap pemerintah dan melakukan tugasnya.

3. Miriam Budiarjo

Politik itu sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut hubungan masyarakat dana bukan tujuan pribadi seseorang.[12]

Beberapa ilmuan dan juga pemikir politik kurang sepakat dengan pengertian politik secara terminologi. Oleh sebab itu mereka menggunakan pendekatan holistik untuk dapat mengartikan politik. Politik memiliki 3 unsur pokok secara parsial dan implisit yaitu :

1. Lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan.
2. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan.
3. Kebijakan dan hukum-hukum yang menjadi sarana penegtahuan dan masyarakatserta cita-cita yang hendak dicapai.

Dari berbagai definisi yang telah disampaikan, kita dapat mengambil pengertian politik yang lebih luas. Politik bukan hanya sebatas sebuah urusan

[12]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h.24

dalam pemerintahan ataupun kebijakan yang dibuat di dalam dan luar negeri, namun hukum ataupu kebijakan ini mencakup kehidupan dalam berumah tangga. Siyasah atau biasa yang disebut dengan politik merupakan cara bagaimana menata kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Politik merupakan sebuah wadah yang besar, bahkan sebesar ruang dalam kehidupan ini. Kita dapat melihatnya di dunia publik, struktural dan kultural, secara persenal maupun kelompok. Namun setelah melihat perkembangannya, politik memiliki arti yang sempit dan terbagi kedalam beberapa sudut pandang. Mulai dari politik praktis, struktural dan lainnya yang merupakan ajang perebutan kekuasan demi kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat dan masa depan negara.

Terlepas dari berbagai persoalan di atas, politik mengandung dua makna, yaitu politik dalam arti luas sebagaimana dikemukakan di atas dan politik dalam arti sempit, yaitu politik yang merupakan tanggung jawab mengatur dan memelihara urusan rakyat dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kepemimpinan politik baik dalam arti luas maupun sempit, Allah SWT memberikan petunjuk dalam Alquran yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 58-59:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah*

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat."[13]

Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa setelah *fathu makkah* (pembebasan makkah), Rasullullah saw memanggil Usman bin Thalhah untuk mrminta kunci Ka'bah. Ketika Usman menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas dan berkata : " Ya Rasullullah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku untuk saya rangkap jabatan itu dengan jabatan siqayah (urusan pengairan). Usman menarik kembali tanganya. Maka bersabdalah Rasullulllah : " Berikan kunci itu kepadaku wahai Usman!. Usman berkata : " Inilah dia, amanat dari Allah ". Maka berdirilah Rasullullah saw. Membuka Ka'bah dan terus keluar untuk thawaf di baitullah. Turunlah Jibril membawa perintah agar kunci itu diserahkan kembali kepada usman. Rasullullah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut diatas. Ayat selanjutnya yaitu Q.S. an-Nisa : 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasullullah dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

[13]Q.S. An-Nissa :58-59

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, kajian terdahulu, landasan teori dan sistematika penulisan.

BAB II BIOGRAFI JAMALUDDIN AL-AFGHANI

Bab ini menjelaskan tentang kehidupan Jamaluddin Al-Afghani secara mendalam.

BAB III PEMIKIRAN JAMALUDDIN AL-AFGHANI

Bab ini berisi tentang perjalanan hidup Al-Afghani sehingga ia banyak menciptakan pemikiran-pemikiran untuk memajukan umat Islam.

BAB IV HASIL ANALISIS PEMIKIRAN JAMALUDDIN AL-AFGHANI

Bab ini berisi hasil analisis penulis dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan di bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penulisan skipsi ini.

BAB II

BIOGRAFI JAMALUDDIN AL-AFGHANI

A. Biografi Jamaluddin Al-Afghani

Nama lengkapnya Sayid Jamaluddin Al-Afghani, lahir di Asadabad tahun 1255 H / 1838 M, meninggal tahun 1315 H / 9 Maret 1897 di Istanbul. Kaca Sayid menunjukkan bahwa dia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Selain Al-Afghani, dia juga dikenal sebagai Asabadi. Nama al-Afghani dianggap berasal dari negara kelahirannya, dia dilahirkan dalam sebuah keluarga penganut mazhab Hanafi.

Tentang tempat kelahirannya ada dua yang bertahan. Dia mengklaim bahwa dia lahir di As'adabad dekat kanan wilayah Kabul Afghanistan. Pendapat lain adalah bahwa dia lahir di As'adabad dekat Hamadan di wilayah Persia. Al-Afghani mengaku sebagai seorang Afghan demi menyelamatkan diri dari kesewenang-wenangan penguasa Persia. Menurut Majid Fakhry, bahwa Al-Afghani lahir di Asadabad Persia, kemudian pindah bersama keluarganya ke Qazwin dan kemudian ke Teheran, di mana dia belajar di bawah Aqashid Shadiq, Teologi Syiah yang sangat terkemuka pada waktu itu, Teheran.[14]

Ayahnya, Sayid Shaftar, adalah salah satu keturunan yang sangat dihormati di Afghanistan. Di tengah garis keturunan ini, ia bertemu dengan perawi hadis yang terkenal, yaitu Sayid Ali At-Turmuzi, dan di antara mereka muncullah Husain Bin Abi Thalib. Ali Rahnema berpendapat bahwa tidak ada sumber utama

[14]Dick Hartono, *Kamus Populer Filsafat,(* Jakarta , Rajawali Press:1986)h.298

yang mendukung tempat lahir atau besarnya Al-Afghan, namun banyak sumber mengatakan ia lahir dan mengenyam pendidikan Syiah di Iran. Hal ini didukung oleh banyaknya tulisan tentang Al-Afgani yang menunjukkan bahwa Al-Afghani mengenyam pendidikan di Iran dan hampir pasti di kota-kota suci Syiah di Irak, ia adalah piawi dalam filsafat Islam dan di syi'ah di sekolah Syi'i yaitu berbeda. Syiah yang sangat filosofis di abad ke-18 hingga ke-19.[15]

Pendidikannya dimulai sejak ia masih kecil, saat itu ia pertama kali diajari mengaji yang diajarkan oleh ayahnya sendiri. Setelah mahir, tahapan selanjutnya adalah belajar bahasa Arab dan Sejarah. Ayahnya sangat memperhatikan pendidikannya, ia juga mendatangkan seorang guru Tafsir, Hadits dan Fiqih untuk mengajar Al-Afghani. Kemudian dilengkapi dengan mata pelajaran lain seperti tasawuf dan ketuhanan. Ketika Al-Afghani mulai berprestasi dalam berbagai ilmu tersebut, kemudian ia dikirim ke India untuk mempelajari ilmu modern (Eropa).

Layanan pertamanya di Afghanistan adalah ketika dia berusia 20 tahun. Apa yang dilakukan di negara itu adalah menjadi asisten pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Selama hidupnya ia menghadapi banyak tantangan karena cara berpikirnya yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan banyak penguasa yang memusuhi dirinya, namun tidak sedikit pula yang memihak pada sikapnya yang selalu membela warga.

Sosok Jamaluddin Al-Afghani merupakan pengikut mazhab Hanafi. Ia juga memainkan peran penting dalam gerakan politik Islam modern. Jamaluddin

[15] Hamka, *Said Djamaluddin Al-Afghani,* (Jakarta,Bulan Bintang:1996)h.16

Al-Afghani juga terkenal di kalangan Syiah dan Sunni dan pengaruhnya dalam kemajuan dan perkembangan Islam di dunia modern. Yang paling dia perhatikan adalah penjajahan Barat dan absolutisme penguasa Muslim dengan memberikan semangat baru dalam membela umat melalui ajaran Islam yang berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi. Dengan itu, ia melakukan ijhtihad untuk mengembangkan ajaran Islam tanpa memandang perbedaan.

Di banyak negara Islam yang dikunjunginya, dari setiap kunjungan tersebut Jamaluddin Al-Afghani menemukan berbagai pengalaman pahit dalam melakukan perubahan. Dia pernah menjadi penasehat Sher Ali Khan, beberapa tahun setelah itu dia menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad A'zam Khan. Penunjukan Muhammad A'zam Khan atas Al-Afghani sebagai Perdana Menteri menemui banyak tantangan. Salah satunya adalah ketika Inggris mulai ikut campur dalam politik dalam negeri Afghanistan. Dalam pergolakan yang terjadi saat itu Al-Afghani memilih berpihak pada kelompok-kelompok penentang yang didukung oleh Inggris. Itu adalah kekalahan pertama dan kemudian Al-Afghani yang merasa lebih aman meninggalkan tanah airnya dan pergi ke India pada tahun 1869.

Di India ia juga merasakan hal yang sama, yaitu tidak mendapatkan kebebasan dalam bergerak dikarenakan negara ini telah jatuh kebawah kekuasaan Inggris. Oleh sebab itu pada tahun 1871 ia pindah ke Mesir. Ia menetap di Kairo dan pada awalnya ia hanya memusatkan perhatiannya pada bidang ilmiah dan sastra Arab dan kemudian menjauhi persoalan-persoalan politik yang ada pada saat itu di Mesir. Rumah yang ia tianggalin merupakan tempat perkumpulan

pengikut-pengikutnya serta tempat pertemuat murid-muridnya. Di tempat itukah dia mengadakan diskusi dan memberikan kuliah kepada murid-muridnya.

Menurut keterangan dari Muhammad Salam Madkur, para murid terdiri dari orang-orang terkemuka dalam bidang pengadilan, mahsiswa dari Al-Azhar, dosen-dosen, pegawai-pegawai pemerintah, serta dari berbagai perguruan tinggi lainnya. Diantara murid-murid Al-Afghani, ada yang menjadi pemimpin kemerdekaan Mesir yaitu Muhammad Abduh dan Sa'ad Zag'lul.

Al-Afghani tidak lama meninggalkan lapangan politik. Pada tahun 1876, ia turut campur tangan Inggris dalam perpolitikan Mesir yang semakin meningkat. Agar ia dapat melakukan hubungan baik dengan orang-orang politik di Mesir, ia pun memasuki perkumpulan di Mesir yaitu Freemason. Diantara orang-orang yang berada di perkumpulan tersebut terdapat pula Putra Mahkota Taufik. Selama berada di Mesir Al-Afgani mengajukan berbagai konsep pembaharuannya, antara lain yang paling pokok:

a. Musuh utama merupakan penjajah Barat, hal ini tidak lain dari lanjutan perang salib.
b. Umat Islam harus menentang penjajahan Barat di mana dan kapan saja.
c. Untuk mencapai semua tujuan itu, uamat Islam harus bersatu (Pan Islamisme)

Al-Afghani dikenal sebagai orang yang banyak merantau. Dari Teheran dia pindah ke al-Najd di Irak, sebuah pusat studi agama Syiah, di mana dia menghabiskan empat puluh tahun sebagai murid Murtadha al-Ansari, seorang teologi dan sarjana terkenal. Pada tahun 1853 dia mengunjungi India, di mana dia

diperkenalkan dengan studi Eropa. Ada kalanya dia melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia, seperti Hijaz, Mesir, Yaman, Turki, Rusia, Inggris dan Prancis. Salah satu perjalanannya yang paling berkesan adalah kunjungannya ke Mesir pada tahun 1869 dan di negara ini ia mulai memikirkan reformasi. Setiap generasi umat harus memiliki lapisan-lapisan istimewa untuk memberikan pendidikan dan pengajaran pada manusia yang kurang memiliki pengetahuan, serta dapat memerangi hawa nafsu jahat dan harus menegakkan kedisiplinan.

Pada saat itu ide-ide baru mulai meluas dikalangan rakyat Mesir, yang mana buku-buku tersebut disampaikan oleh Al-Tahwawi melalui terjemahan dan karangannya. Diantara ide-ide tersebut yaitu berupa ide trias politica dan patriotisme. Trias politika dapat diartikan sebagai sebuah ide dimana pemerintah yang berdaulat harus dipisahkan dari dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas. Sedangkan patriotisme merupakan sebuah sikap pantang menyerah, berani dan juga rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pada tahun 1879 atas usaha yang dilakukan oleh Al-Afghani terbentuklah sebuah partai yang bernama Al-Hibz al-Watani (Partai Nasional). Partai tersebut memiliki selogan yaitu "Mesir untuk orang Mesir". Tujuan dari partai ini adalah memperjuangkan pendidikan secara universal, pemasukan unsur-unsur Mesir ke dalam posisi-posisi bidang militer dan juga kemerdekaan pers.

Atas dorongan dari partai Nasional tersebut al-Afghani berusaha dalam menggulingkan Raja Mesir yang saat itu sedang berkuasa, yaitu Khedewi Ismail. Agar dapat digantikan oleh Putra Mahkota Taufik. Namun ketika ia telah menjadi Khedewi, Taufik mengusir al-Afghani keluar dari Mesir atas tekanan yang

dilakukan Inggris pada tahun 1879. Padahal sebelumnya ia telah berjanji akan mengadkan pebaruan-pembaruan yang di tuntut Al-Hibz al-Watani. Selama 8 tahun al-Afghani menetap di Mesir ia telah memberikan pengaruh besar krpada orang-orang Mesir. Bahkan menurut M.S Madkur, Al-Afghani yang telah membangkitakan gerakan-gerakan dan cara berpikir orang-orang mesir, sehingga negara tersebut dapat mencapai kemajuan. Semua itu merupakan usaha dari Jamaludin Al-Afghani.

Setelah dari Mesir Al-Afghani pergi ke Paris dan kemudian ia mendirikan perkumpulan Al-‘Urwah al-Wusqa, yang artinya ikatan yang teguh. Anggotanya merupakan orang-orang yang terdiri dari umat muslim India, Afrika Utara , Mesir, Syria dan lainnya. Tujuan dibentuknya perkumpulan tersebut ialah untuk membela Islam, memperkuat pesaudraan Islam dan membawa umat Islam dan Negara Islam kepada kemajuan. Dari perkumpulan tersebut mereka menerbitkan Majalah Al-‘Urwah al-Wusqa, yang majalah tersebut sangat terkenal, begitu juga di Indonesia. Namun sayangnya kepopuleran majalah ini tidak cukup panjang. Hal ini disebabkan oleh keterpasaan pemberhentian dari penerbit karena Dunia Barat melarang pemasukannya ke negara-negara Islam yang berada di bawah kekuasaan mereka

Al-Afghani adalah seorang modernis dan reformis, juga dikenal sebagai seseorang yang pernah aktif di dunia politik. Hal ini dibuktikan pada tahun 1876 ketika ia bergabung dengan politisi di Mesir pada tahun 1879 membentuk partai politik dengan nama Hizb al-Wathani (Partai Nasionalis). Dengan partai ini ia mencoba menanamkan kesadaran nasionalisme pada masyarakat Mesir. Al-Afgani

juga dikenal sebagai seorang filsuf, jurnalis dan sufi, namun yang paling banyak diterbitkan adalah sebagai politikus. Karena berbagai ide reformasi yang ia hasilkan, ia sering ditekan bahkan dipenjara oleh para pengusaha yang tidak setuju dengan ide yang ia perjuangkan. Hal ini menimbulkan mitos seputar kematiannya, bahwa ia meninggal setelah diracun oleh Sultan. Namun, bukti terdokumentasi dengan baik bahwa Al-Afghani meninggal karena kanker di dagunya dan menjalani operasi.

B. Ide Pembaruan Jamaluddin Al-Afghani

Gagasan Al-Afghani untuk mereformasi dan mengembangkan pemikiran kalam didasarkan pada keyakinan bahwa Islam cocok untuk semua bangsa, usia dan keadaan. Tidak ada konflik antara ajaran Islam dengan kondisi yang disebabkan oleh perubahan zaman. Jika terlihat ada pertentangan di antara keduanya, dilakukan penyesuaian dengan membuat tafsir baru terhadap ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Untuk mewujudkannya, ijtihad dilakukan dan pintu ijtihad, menurutnya masih terbuka.

Ide yang dia perjuangkan tadi adalah untuk mempersatukan dunia Islam, umat Islam di seluruh dunia harus bersatu dalam menghadapi serangan Barat. Nikki R. Keddie berkomentar bahwa Sayyid Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pencetak modernisme Islam, terutama aktivis anti-imperialis. Dia juga menganjurkan, memperjuangkan dan memelihara persatuan Pan-Islam, karena itu adalah sarana untuk memperkuat dunia Muslim melawan Barat.

Al-Afghani sangat bersemangat untuk mewujudkan komunitas Muslim

yang kuat, dinamis, dan maju. Ide yang dikedepankan untuk dapat mewujudkan hal tersebut adalah dengan menghilangkan anggapan yang salah yang dianut oleh umat Islam dan kembali pada ajaran Islam yang benar. Menurutnya, Islam mencakup semua aspek kehidupan, baik ibadah, hukum maupun sosial. Gaya pemerintahan otokratis harus diubah menjadi gaya pemerintahan yang demokratis dan persatuan umat Islam harus diwujudkan kembali. Kekuatan dan kelangsungan hidup umat Islam bergantung pada keberhasilan membina persatuan dan kerjasama.

Pemikiran lain yang dilontarkan oleh Al-Afghani adalah idenya tentang kesetaraan antara pria dan wanita dalam beberapa hal. Wanita dan pria itu sama dalam pandangannya, keduanya punya alasan untuk berpikir. Ia melihat tidak ada kendala bagi perempuan untuk bekerja di luar jika situasi menuntut. Wanita harus berjuang untuk kemajuan dan dapat bekerja sama dengan pria untuk menciptakan komunitas Muslim yang maju dan dinamis.

Di sisi lain, secara umum Al-Afghani memunculkan ide-ide untuk mempromosikan peran Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Ia melihat bahwa umat Islam saat itu belum banyak memahami Al-Quran dan Hadits, sehingga pemikiran dan tindakan mereka keluar dari jalur Alquran. Karena tidak memahami Alquran dengan baik, umat Islam dengan mudah terjerumus ke berbagai paham yang menyesatkan, begitu pula pemahaman jabariyah yang tidak percaya diri dan cenderung meninggalkan bisnis, kecanggihan yang tidak mengenal dunia nyata, berbagai ajaran tasawuf yang mengasingkan diri, uzlah dan fana yang membawa kelemahan bagi umat Islam.

Sebagai pemikir di bidang kalam atau teologi, Al-Afghani melalui karyan *Al-Radd 'ala al-Dahriyyin* (Penolakan Materialis atau Naturalis) menentang filosofi materialis dan naturalis yang tidak bertuhan. Kemudian ia menyampaikan sumbangan pemikiran yang tak ternilai harganya dalam upaya mencapai peradaban dan kemajuan. Al-Afghani menjelaskan bahwa agama mengajarkan manusia tiga kebenaran mendasar:

1. Sifat malaikat atau spiritual manusia yang menguasai semua makhluk;
2. Keyakinan setiap komunitas agama pada keunggulannya sendiri atau semua kelompok lainnya;
3. Kesadaran bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanyalah persiapan untuk kehidupan lain yang lebih tinggi yang benar-benar bebas dari segala penderitaan dan yang pada akhirnya ditakdirkan untuk didiami oleh manusia.

Ketiga kebenaran mendasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Kebenaran pertama akan menimbulkan dorongan yang kuat pada manusia untuk mengatasi berbagai kecenderungan hewan dan menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis antar manusia. Kebenaran kedua, akan membangkitkan semangat daya saing dalam konteks mewujudkan kehidupan individu dan komunitas yang sesuai dengan kebenaran tersebut. Mereka akan selalu berusaha memperbaiki nasibnya dalam berbagai aspek kehidupan hingga mencapai peradaban yang tinggi. Kebenaran ketiga, akan membangkitkan dorongan untuk menyempurnakan pandangan dunia yang lebih tinggi tentang kehidupan, yang pada akhirnya mereka akan kembali, untuk membebaskan diri dari semua

kejahatan.

Selain tiga jenis kebenaran di atas, Al-Afghani juga menjelaskan bahwa agama telah menanamkan tiga karakter pada pemeluknya, yaitu:

1. Kerendahan hati, ini akan menjauhkan diri dari segala perbuatan jahat dan menuntun pada pertobatan;
2. Sejujurnya, ini adalah benteng untuk penegakan hukum yang sehat; dan
3. Dapat dipercaya, tanpa pergaulan manusia yang berkualitas ini hampir tidak mungkin.

Keyakinan religius yang benar, harus dibangun di atas demonstrasi yang kokoh dan bukti yang sah, daripada mimpi atau pendapat para pendahulu kita. Keunggulan Islam terletak pada kenyataan bahwa ia menginstruksikan pengikutnya untuk tidak menerima apapun tanpa verifikasi dan memperingatkan mereka untuk tidak tersesat oleh angan-angan atau pikiran spontan.

Salah satu kata Al-Afghani dalam *Al-Radd 'ala al-Dahriyyin* yang dikutip oleh Majid Fakhry sebagai berikut: Agama ini menginstruksikan para pemeluknya untuk mencari landasan demonstratif atas landasan keyakinan. Oleh karena itu dia selalu menyebutkan akal dan mendasarkan aturannya padanya. Teks-teks tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kebahagiaan manusia adalah hasil (produk) dari akal dan pengetahuan dan bahwa penderitaan atau kutukan adalah hasil dari ketidaktahuan, mengabaikan akal dan cahaya pengetahuan.

Kemerosotan umat Islam bukan karena Islam, sebagaimana diasumsikan, tidak sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi baru. Ketertinggalan atau keterbelakangan umat Islam karena telah meninggalkan

ajaran Islam yang benar dan mengikuti ajaran yang datang dari luar yang asing bagi Islam. Ajaran Islam yang sesungguhnya hanya hidup dalam ucapan dan di atas kertas. Beberapa dari ajaran asing ini dibawa oleh orang-orang yang berpura-pura suci, yang lainnya adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan yang menyesatkan dan sebagian lagi dari tradisi artifisial.

C. Usaha Pembaruan dan Karya Jamaluddin Al-Afghani

Dengan luasnya ilmu yang dimiliki Al-Afghani dari sejumlah gurunya dan banyaknya pengalaman yang didapat dari hasil kunjungannya ke berbagai daerah di seluruh dunia, dunia Islam. Salah satu latar belakang budaya yang mempengaruhi pemikiran Al-Afghani dalam menggagas gagasan pembaharuan adalah keterpurukan dunia Islam (umat Islam) dalam berbagai aspek kehidupan, ada perpecahan atau disintegrasi Islam yang justru memegang teguh ketaatan pada peniruan. , fatalistik dan melupakan sains. Hal ini terjadi akibat penjajahan dan imperialisme oleh dunia barat seperti Inggris dan Rusia terhadap dunia Muslim. Pengaruh barat ini menyebabkan kediktatoran dan depotisme oleh raja dan sultan di dunia Islam.

Uraian tentang kemunduran dan kemunduran umat Islam pada masa itu dipaparkan dalam artikel berjudul "Masa lalu umat dan masa kini, serta pengobatan penyakit mereka" yang diterjemahkan dan diedit oleh Nurcholish Madjid dalam buku berjudul *Islamic Intellectual*. Harta Karun. Dalam artikel tersebut, Al-Afghani mengatakan bahwa umat Islam telah mengalami kemajuan dan kejayaan, namun kondisi tersebut lenyap dan hilang setelah umat Islam tidak

menganut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, akibatnya menjalani kehidupan yang penuh tiruan dan diikuti. takhayul dan bid'ah.[16]

Jamaluddin Al-Afghani memberikan gambaran bagaimana kondisi umat Islam ketika dipadukan dengan doktrinnya. Maka karena itu diperlukan segera hal-hal yang dapat mengembalikan pemikiran mereka dari hal-hal tersebut, agar mereka dapat kembali kepada ajaran Islam yang murni. Untuk melakukan ini tidak akan mudah dilakukan. Di akhir tulisan, Al-Afghani heran dengan ungkapan masyarakat bahwa asas-asas agama yang benar adalah hasil terbebas dari berbagai inovasi yang diciptakan (manusia), kemudian tumbuh dalam diri masyarakat akan kekuatan persatuan, kekompakan, dan sikap yang lebih penting. kehormatan (ummah) di atas kenikmatan hidup, membangunkannya menuju kemuliaan, memperluas ruang lingkup ilmu dan mengarah ke puncak peradaban tertinggi.[17]

Upaya yang dilakukan oleh Al-Afghani dalam mewujudkan reformasi adalah menyebarkan gagasan reformasi ke seluruh lapisan masyarakat muslim. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: pertama melalui pengajian yang dilaksanakan di rumahnya di Jalan Khan Halili yang dihadiri oleh para ulama terkemuka seperti Syekh Muhammad Abdullah, Syekh Abdul Kairm Salman, Syekh Ibrahim al-laqani, Sa'ad Zaglul dan lain-lain. -lain. -Lainnya, dengan pembahasan buku tentang politik, tasawuf, logika, dan filsafat. Cara kedua melalui ceramah dan diskusi yang bersifat intelektual dalam persaudaraan yang pada umumnya dihadiri oleh kalangan sastra, seniman, budayawan, politikus dan tokoh agama, dengan diskusi tentang sastra dan perjuangan bangsa. Di sini ia

[16]Nurcholish Majid,*Ed. Khazanah Intelektual Islam*,(Jakarta,Bulan Bintang:1994)h.11
[17]Nurcholish Majid,*Ed. Khazanah Intelektual Islam*,(Jakarta,Bulan Bintang:1994)h.361

mencoba mengalihkan arah orientasi sastra yang pada saat itu mengarah pada keagungan dan glamor kelas atas (bangsawan) menuju kelas bawah, yaitu orang-orang dengan segala penderitaan, keterbelakangan, dan kemiskinan.[18]

Pada tahun 1883 saat berada di Paris, Al-Afghani mendirikan sebuah kelompok bernama *al-'Urwah al-Wusqa* (Ikatan Kuat) dan anggotanya terdiri dari Muslim dari India, Mesir, Syria, Afrika Utara dan lainnya. . Tujuan didirikannya kelompok ini antara lain memperkuat rasa persaudaraan Islam yang membela Islam dan membawa umat Islam untuk maju. Sebagai sarana penyampaian gagasan dan kegiatannya, Al-Afghani bersama Muhammad Abduh menerbitkan majalah berkala yang diberi nama *al-'Urwah al-Wusqa* yang sama dengan nama organisasi persaudaraan Islam (Ikatan Kuat). Majalah ini baru berumur delapan bulan karena dunia barat melarang peredarannya di negara-negara Islam. Masalah ini dinilai dapat menciptakan semangat dan persatuan di kalangan umat Islam.

Dalam majalah *al-'Urwah al'Wusqa*, Al-Afghani membahas beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema-tema reformasi yang diperjuangkannya, diantaranya mengenai:

1. Menganut agama Allah SWT dan tidak bercerai (Ali Imran: 103 dan 105).
2. Jangan mengajak orang-orang di luar Islam untuk berteman dengan keyakinan Anda sendiri (Ali Imran: 118)
3. Jangan takut mati karena kematian pasti akan bertemu (Al-Nisa: 78)
4. Taat kepada Tuhan dan jangan bercerai (Al-Anfal: 46).
5. Allah tidak mengubah nasib suatu orang kecuali mereka mencoba

[18]Muhammad Laily Mansur, *Pemikiran Kalam Dalam Islam,(*Jakarta, Pustaka Firdaus:1994)h.90

mengubahnya (al-Ra'd: 11)

6. Orang yang beriman akan mendapat ujian keimanan (al-Ankabut: 2).
7. Sunnatullah berlaku untuk orang-orang sebelumnya dan sunnatullah tidak berubah (Al-Ahzab: 62).
8. Umat Islam harus saling mengingatkan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman (al-Zariyat: 55).
9. Taruhlah kepercayaan dan taubatmu hanya kepada Allah (al-Mumtahanah: 4).
10. Allah tidak akan menganiaya manusia, kecuali mereka menzalimi diri sendiri (al-Baqarah: 57).

Upaya reformasi Al-Afghani selain yang telah disebutkan di atas adalah dengan membuat karya tulis baik dalam bentuk buku maupun artikel. Salah satu karya Al Afghani yang berupa buku terbitan adalah *Al-Radd'ala al-Dahriyin* yang aslinya ditulis dalam bahasa Presian. Pekerjaan lain:

1. Bab *ma Ya'uiu Ilaihi Amr al-Muslimin* (Diskusi tentang sesuatu yang melemahkan umat Islam),
2. *Makidah al-Syarqiyah* (Bimbingan Orientalis),
3. Risalah *fi al-Raddu 'Ala al-Masihiyin* (Risalah Untuk Menjawab Umat Kristen: 1895),
4. *Diya 'al-Khafiqain* (Hilangnya Timur dan Barat; 1892),

   Haqiqah al-Insan wa Haqiqah al-Watham (Hakikat Manusia dan Hakikat Tanah Air; 1878).

BAB III

PEMIKIRAN JAMALUDDIN AL-AFGHANI

A. Gagasan Politik Jamaluddin Al-Afghani

Perjalanan di berbagai negara Islam yang telah dilalui telah membuat Al-Afghani menjumpai banyak pengalaman, salah satunya adalah pengalaman pahit yang mengharuskan Al-Afghani melakukan perubahan, yaitu di dunia Islam, dimana pada saat itu mayoritas pemerintahannya adalah *otokratis* dan *absolut*. Pemerintah seolah-olah menjalankan kekuasaan tanpa adanya pengaruh dari hukum atau undang-undang yang menyebabkan rusaknya ketertiban dan berbagai sistem yang tentunya dapat merugikan umat Islam pada khususnya dan warga negara pada umumnya. Yang mungkin terjadi adalah pemerintah tidak mau membuka diri dalam musyawarah pada saat mengambil keputusan sehingga kebijakan yang diambil dapat memperkuat posisi pemerintah.[19]

Kebijakan yang diambil pertama kali oleh Jamaluddin Al-Afghani adalah melakukan banyak pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman pemikiran yang lebih baik dari sebelumnya. Jamaluddin Al-Afghani juga memberikan penilaian tentang kekuatan negara yang hanya bisa kuat jika masyarakat bisa bersatu. Menurutnya, imperialisme dari negara-negara Barat sangat mengancam dan berbahaya bagi umat Islam. Penyakit absolutisme dan despotisme dapat memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat sehingga tidak mampu bangkit dari penjajahan. Akibat kejadian ini, umat Islam selalu

[19]Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan,* (Jakarta: Bulan Bintang. 1975)h.52

berpikir tentang kemurtadan bahkan percaya pada tahayul, dan bid'ah.

Untuk memajukan masyarakat dari hal-hal tersebut, Al-Afghani melakukan gerakan rakyat untuk melakukan revolusi dan perubahan pemerintahan imperialisme dan kolonialisme Barat. Selain itu, Al-Afghani juga berusaha memperbaiki aqidah umat Islam yang korup dengan mengembalikan mereka pada ajaran Islam yang benar. Menurutnya, penyimpangan atau kesalahan terhadap aqidah membuat umat Islam menjadi orang yang tidak mendapat perhatian dan tidak dihormati bangsa lain untuk bisa maju, oleh karena itu perlu tegas dalam mengamalkan agama agar terbebas dari kejahatan. dari para penguasa dan kolonialisme negara lain.

Tujuan imperialisme Barat tidak hanya untuk mengontrol pemerintah menjadi absolutisme, tetapi lebih dari itu, mereka juga ingin mengubah kepercayaan masyarakat menjadi materialisme. Oleh karena itu, Al-Afghani berusaha mendorong umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam yang benar dan membangkitkan kesadaran umat Islam guna menyingkirkan penjajahan dan kekuasaan otoriter yang berdiri tepat di belakangnya. Bahkan ia juga berpesan agar umat Islam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam pemahaman Pan Islamisme.[20]

Gerakan pemikiran yang dilakukan oleh Al-Afghani selalu berorientasi pada salafiah untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Menurutnya, umat Islam harus meniru orang-orang sebelumnya seperti di masa kejayaan al-khulafa

[20] Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Kajian Politik Islam Liberal, Sejarah, Konsepsi, Penyimpagan dan Jawaban,* (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), h. 59

al-rashidin karena mereka murni menjalankan ajaran agama tanpa bercampur dengan pemahaman khurafat yang dapat merusak aqidah umat Islam. Namun, Al-Afghani tidak memungkiri keunggulan Barat terutama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk mengatasi kelebihan tersebut, umat Islam perlu belajar dari Barat agar bisa kembali ke masa kejayaan umat Islam seperti semula lagi. Gerakan salafiyah Al-Afghani tidak lebih dari sekedar ingin mengembalikan kejayaan umat Islam dalam menjalankan agamanya. Al-Afghani tidak ingin umat Islam menjalankan taqlid tanpa mengetahui sumber ajarannya yang pada akhirnya menjadi orang terbelakang karena meninggalkan sumber utama ajarannya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.[21]

Al-Afghani mengatakan demokrasi demokrasi dapat dilaksanakan di Mesir agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan konstitusi yang telah ditetapkan. Demokrasi demokrasi adalah *representasi* rakyat dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang anggotanya merupakan pilihan rakyat. Bagi Al-Afghani sendiri, dia tidak begitu percaya pada pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan asing. Pasalnya, semua kepentingannya akan selalu berpihak pada penguasa, bukan rakyat, bahkan kekuasaan bisa dijadikan alat politik untuk mendapatkan segala yang diinginkannya. Oleh karena itu, gagasan pemerintahan rakyat merupakan solusi yang dapat ditawarkan oleh Al-Afghani untuk memperbaiki keadaan agar lebih baik dan lebih kondusif sehingga kekuatan *absolutisme* dapat dilawan. Pemerintahan yang berorientasi kerakyatan akan memberikan keadilan kepada warga negara yang dapat mengatur tatanan

[21] Sehat Sultoni Dalimunthe, *Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Bangunan Islamic Studies* ,(Yogyakarta: Deepublish, 2018)h.95

kehidupannya secara tertib dan damai.

Al-Afghani juga menyadari bahwa kelemahan umat Islam disebabkan oleh mudahnya perpecahan sehingga Barat menemukan celah untuk mengambil kejayaan umat Islam. Maka upaya yang bisa dilakukan adalah mengajak mereka melakukan perbaikan secara internal, menghimpun kekuatan dan mengadopsi peradaban yang dimiliki oleh Barat.

Alasan Al-Afghani bangkit, ia mempunyai tujuan untuk memperbaiki suasana yang kurang menguntungkan ini karena sistem pemerintahan yang terjadi tidak memberikan keadilan kepada warganya, sehingga mereka berkesempatan untuk menjadikan negara yang lalim. Maka wajar saja jika Negara-negara Timur tidak bersatu untuk memberikan pencerahan dan kebaikan kepada warganya, itu semua karena negara-negara Barat masih mengikat sistem pemerintahan yang terjadi di Negara-negara Timur.[22]

B. Wacana Pan Islamisme

Pan Islamisme atau yang biasa disebut solidaritas Muslim adalah ide yang sangat menarik yang dicetuskan oleh Al-Afghani. Ide ini muncul karena Al-Afghani melihat perpecahan yang muncul di kalangan umat Islam yang berujung pada masalah khilafiyah. Umat Islam harus bangkit dari *kolonialisme* sehingga dibutuhkan persatuan di antara mereka. Umat Islam di dunia, khususnya di Timur, harus bersatu guna memupuk dan mengembangkan tanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Jangan hanya karena masalah perbedaan

[22]Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiah Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaruandalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 1998)h.77

pendapat umat Islam harus dipecah belah. Diantara contoh yang dikemukakan oleh Al-Afghani adalah kasus Sunni dan Syiah yang hingga saat ini belum bisa disatukan karena perbedaan pemahaman.[23]

Pan-Islamisme bukan diartikan sebagai leburnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu, namun mereka harus memiliki ataupun mempunyai satu pemandangan yang sama kemudian bersatu untuk mendapatkan kerja sama yang baik. Kerja sama dan persatuan merupakan sendi yang sangat penting dalam Islam. Persatuan di dalam Islam hanya dapat dicapai apabila berada dalam kesatuan pandangan serta kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang murni yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Untuk tercapainya usaha-usaha pembaharuan tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan:

a. Setiap rakyat diharuskan untuk membersihkan diri dari berbagai kepercayaan takhayul.
b. Harus memiliki kepercayaan dan juga meyakini bahwa mereka akan mencapai derajat yang tinggi.
c. Meyakini rukun iman dengan benar dan juga dijadikan sebagai pandangan hidup agar memiliki kehidupan yang lebih baik.

Gagasan Pan Islamisme bagi Al-Afghani sebenarnya bukanlah sebuah konsep baru, karena para tokoh Sunni dan Syiah sudah pernah membahasnya, namun mereka tidak berhasil menyatukan konsep tersebut, hal ini dikarenakan idealisme yang sangat mendasar antara mereka dan sulit untuk berubah kembali.

[23]John D. Donohue dan John L. Espotio, *Islam dan pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah* ,(Jakarta: Rajawali, 1984), h.25.

Maka ide-ide yang ditawarkan oleh Al-Afghani antara lain umat Islam dituntut untuk melakukan pembenahan secara internal agar mampu mewujudkan kemajuan masing-masing di tengah globalisasi dan persaingan yang ketat.

Pan Islamisme bentukan Al-Afghani sebenarnya tidak hanya mengajarkan warganya untuk bersatu dalam mengamalkan agamanya. Namun, lebih dari itu Pan Islamisme diciptakan untuk membangun kekuatan guna mewujudkan kemajuan dalam bernegara dan juga sebagai bentuk kerangka untuk melawan penjajahan Barat. Al-Afghani tidak mengizinkan umat Islam menjadi budak di negerinya sendiri, bahkan dia sangat menentang penjajahan karena hal itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Al-Afghani menginginkan hubungan antar negara terjalin dengan baik guna melakukan kerjasama di berbagai bidang. Untuk melawan penjajah, perlu ada ikatan persatuan terlepas dari semua perbedaan.[24]

Selama di Mesir, Al-Afghani sangat prihatin melihat kondisi yang memprihatinkan, dimana rakyatnya hidup dalam kemiskinan, sedangkan kekayaan alam yang mereka miliki sepenuhnya dikuasai oleh Barat. Dengan kesadaran penuh, Al-Afghani mulai bangkit dan rajin berkampanye, menurutnya warga saat ini banyak dieksploitasi oleh Barat sehingga sulit untuk melakukan perbaikan. Untuk memperbaiki kondisi ini, seluruh warga negara harus berjuang agar haknya bisa dikembalikan. Al-Afghani menilai Pan Islamisme sebenarnya bukan orientasi agama melainkan membangun peradaban agar negara-negara Islam bisa bangkit kembali.

---

[24]Mohammed ‘Abed al-Jabiri, *Arab-Islamic Philosophy: a Contemporary Critique, Terj. Moch Nur Ichwan, “Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam”* (Yogyakarta: Islamika, 2003) h. 9

Dalam perjalanannya, Pan Islamisme Al-Afghani ternyata hanya sebuah wacana karena gagasan dan gagasan tersebut tidak pernah diimplementasikan dalam tatanan negara dan agama. Namun pengaruhnya sangat luas di kalangan umat Islam. Buktinya, gagasan Pan Islamisme mampu melahirkan *fundamentalisme* sehingga umat Islam dapat melawan sikap taqlid dan menjauhi bayang-bayang dogmatis dan stagnasi yang dapat merusak sistem keagamaan umat Islam. Al-Afghani ingin membuka pikiran umat Islam agar tidak terjebak oleh doktrin dan pemahaman tradisional. Dibutuhkan pikiran yang rasional untuk membuka kebuntuan tersebut agar peluang ijtihad tetap terbuka dan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan agama.[25]

Ayat-ayat Al-Qur'an bagi Al-Afghani perlu ditafsirkan secara luas agar maknanya secara global. Dogmatik dan ritual yang dilakukan warga harus disterilkan agar kembali ke ibadat yang benar. Berdasarkan sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa Al-Afghanistan sebenarnya menganut modernisme dan fundamentalisme. Diantara ciri-ciri fundamentalisme yang dapat dikedepankan adalah:

1. Penafsiran cenderung *represif* sehingga semua bentuk yang dicapai memiliki kekuatan absolut.
2. Dalam mewujudkan ketertiban negara, pandangannya selalu cenderung teokratis sehingga diperlukan penyatuan antara agama dan negara.
3. Fundamentalisme sangat menolak sistem kafitalisme Barat sehingga kedaulatan ada di tangan rakyat.

[25]Arkoun, M. dan Louis Gardet, *Al-Islamul-'Amsu wa Islamul-Ghad, Terj. Ahsin Mohammad "Islam Kemarin dan Hari Esok"* (Bandung: Pustakan, 1997),h.24

4. Fundamentalisme sangat sejalan dengan gagasan pan Islamisme bahwa untuk mewujudkan negara yang adil diperlukan persatuan antar umat Islam.

Ide Al-Afghani tentang Pan Islamisme mendapat respon positif dari masyarakat, termasuk pemerintahan Ottoman di Turki. Karena lebih memilih menjadi sarjana daripada politikus, Al-Afghani lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada pendidikan dan mampu melahirkan ilmuwan terkenal, Muhammad Abduh. Ketertarikan Muhammad Abduh pada Al-Afghani karena banyak dari idenya yang rasional dan filosofis. Teori-teori pendidikan yang digagas Al-Afghani tidak lebih dari harus merespon situasi saat itu sehingga menuntut adanya perubahan yang menyeluruh di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial maupun agama. Gagasan Pan Islamisme menurut Al-Afghani tidak berarti mempersatukan seluruh kerajaan Islam tetapi lebih menekankan pada aspek persatuan yang harus ditempa oleh umat Islam karena landasan kejayaan Islam adalah aspek solidaritas.[26]

C. Konsep Negara

Al-Afghani selalu menyuarakan tentang bentuk NKRI dalam sistem ketatanegaraan, hal ini disebabkan konsep tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang terkandung di dalamnya. Inilah salah satu penyebab ia tidak pernah merespon sistem kekuasaan yang absolut karena tidak mencerminkan nilai-nilai kerakyatan dan justru lebih condong pada kepentingan kekuasaan.

[26] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tato Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 59.

Dalam konsepnya, setidaknya pemerintah harus melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan agar semua pihak terkait dapat terlibat dalam pengambilan kebijakan. Untuk menghormati hak-hak individu, diperlukan majelis yang membahas semua aspek masalah yang dihadapi masyarakat (seperti MPR di Negara Indonesia). Dengan demikian, rakyat sangat berdaulat untuk menyuarakan aspirasinya melalui perwakilan tersebut. Orang dapat dengan bebas mengungkapkan pendapatnya dan pemimpinnya tunduk pada konstitusi.[27]

Didalam sistem Republik yang diprakarsai oleh Al-Afghani, hukum atau undang-undang menjadi acuan utama dalam bernegara. Pemerintah harus melaksanakan hukum dan harus tunduk serta mematuhinya. Sistem seperti itu tidak menciptakan jurang pemisah antara rakyat dan pemerintah. Status masyarakat dan pemerintah di depan hukum sama dan tidak ada yang diskriminatif sehingga hak asasi manusia dapat ditegakkan berdasarkan konstitusi. Bagi Al-Afghani, kekuasaan hanya bisa didapatkan melalui kedaulatan rakyat, sehingga sangat demokratis jika pemimpin dipilih oleh rakyat. Pemikiran seperti ini seakan meniadakan sistem kekhalifahan yang telah lama dibangun pada masa kejayaan Islam. Namun, Al-Afganistan senantiasa berpegang pada prinsip kemashlatahan dalam menuangkan gagasannya agar gagasan tersebut mendapat perhatian di mata masyarakat.

Demokrasi yang diyakini oleh Jamaluddin Al-Afghani selalu mengarah pada demokrasi kerakyatan sehingga absolutisme dan otokratisisme menjadi musuh utama dalam sistem pemerintahan. Rakyat harus diajar untuk demokratis,

---

[27]Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*,(Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2006),h.71

masyarakat tidak boleh tinggal diam begitu saja menerima keputusan yang telah ditentukan, keterlibatan masyarakat harus menjadi ranah dalam pengambilan keputusan agar konstitusi dapat dihormati. Bagi Al-Afghani, *absolutisme* dan *otokratisisme* cenderung merugikan masyarakat karena meniadakan hak individu dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan terbentuknya lembaga perwakilan rakyat, masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga tersebut haruslah orang-orang yang dipercaya bisa menyuarakan aspirasi rakyat, bukan aspirasi atau kepentingan pemerintah yang cenderung otokratis.[28]

Dilihat dari cara berpikir Jamaluddin Al-Afghani, dapat disimpulkan bahwa gagasan ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Namun, Al-Afghani melangkah lebih jauh dikarenakan ia mendapat respon dari dunia Islam, khususnya dalam menerapkan sistem pemerintahan Republik. Guna menembus penetrasi Barat dan kekuasaan Turki Utsmaniyah, Al-Afghani berani mengambil risiko mengedepankan gagasannya guna memberikan kebaikan bersama di kalangan umat Islam karena keadaan yang menuntut hal tersebut.

Umat Islam mengundurkan diri karena sistem pemerintahan yang tidak berdaya sehingga segala keputusan dan kebijakan diambil oleh pemerintah hanya untuk memperkuat kekuasaannya. Ternyata sistem demokrasi yang digagas oleh Al-Afghani lebih mendapat respon di mata masyarakat daripada gagasan Pan Islamisme yang tidak pernah terwujud.

---

[28] Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar)h.47

D. Naturalisme dan Materialisme

Naturalisme secara umum merupakan pandangan filosofis yang menyatakan bahwa kajian ilmu-ilmu manusia dan nonmanusia tidak memerlukan penjelasan dengan mengacu pada sesuatu di luar fenomena alam. Naturalisme diungkapkan dalam pemikiran Herbert Spencer yang bertolak dari prinsip dinamis kehidupan berupa fakta hukum perkembangan *(evolusi).* Pengembangan adalah integrasi objek, di mana objek berubah dari kesamaan tak terbatas tanpa kombinasi menjadi satu keragaman tertentu. Perubahan ini menunjukkan bahwa relasi dan gerakan yang menyertainya pun mengalami perubahan yang sama.

Sedangkan materialisme adalah pemikiran filosofis yang menyatakan bahwa yang benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya segala sesuatu terdiri dari materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Orang-orang yang percaya pada materialisme tidak mengakui adanya hal-hal non-material yang biasanya diyakini oleh semua umat Islam, misalnya malaikat, jin, setan dan sebagainya. Pemahaman ini juga meyakini bahwa aktor immaterial tidak ada. Satu-satunya realitas adalah materi dan segala sesuatu adalah manifestasi dari aktivitas material. Materi dan aktivitasnya abadi. Tidak ada penggerak pertama atau penyebab pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua fenomena berubah, akhirnya melampaui keberadaan, kembali lagi ke landasan material primordial, abadi, dalam bentuk transisi abadi dari materi.

Sebagai tokoh politik, Al-Afghani juga dikenal memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam mengembangkan ajarannya. Al-Afghani tidak ingin untuk kedua kalinya terjebak dalam sistem kolonial Barat yang sedang merosotnya umat Islam. Seperti Barat, salah satu cara untuk menipu umat Islam dari ajaran mereka adalah dengan mengembangkan naturalisme dan materialisme. Namun, Al-Afghani sangat menentang pemahaman tersebut karena dapat merugikan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Umat Islam harus mensucikan aqidahnya dengan ajaran tauhid dan tidak terjebak dalam khurafat atau tahayul. Ajaran tauhid harus didahulukan di atas segalanya karena dengan cara ini untuk mengesahkan Allah SWT.[29]

Dalam perjalanannya, Al-Afghani berpegang pada tiga teori pemahaman agama yang dapat menyelaraskan posisi manusia dan perilakunya, yaitu melalui ketenangan pikiran, menjaga perasaan religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ketiga aspek ini tentunya sangat bertolak belakang dengan ateisme yang dikembangkan oleh Barat yang dapat menghancurkan ajaran Islam. Karena menurutnya untuk memecah belah umat Islam jalan yang ditempuh adalah dengan berpaling dari ajarannya sehingga menjauh dari agamanya.[30]

Bagi Al-Afghani, Naturalisme dan Materialisme tidak lebih dari sekedar ingin menjadikan umat Islam menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menuruti keinginan penjajah dan kelompok yang ingin menjadi oposisi. Kedua kelompok ini sebenarnya bertentangan dengan semangat perjuangan Al-Afghani yang

[29] Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi HIngga Kini*,(Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001)h.60

[30] Ris'an Rusli, Pemikiran Teologi Islam, (Cet. I; Depok: Prenadamedia Grouf, 2018), h.95

menjunjung tinggi prinsip ketaatan dalam pemerintahan berdasarkan konstitusi. Diantara kekurangan ajaran ateisme yang mengakar di masyarakat karena jauh dari nilai-nilai kejujuran. Bagi ateis, kejujuran merupakan kemungkinan yang tidak terjadi dalam kehidupan sehingga hidup dalam ateisme harus dijalani apa adanya tanpa pertimbangan agama. Dalam pemahamannya, ateisme tidak lebih dari mengorbankan kesetiaan dan kesopanan. Karena dua kompartemen ini mengarahkan umat Islam pada keinginan yang tidak terbatas.[31]

Penolakan Al-Afghani terhadap naturalisme dan maeterialisme karena semangat religiusnya dan keberpihakannya pada masyarakat dalam menjalankan agamanya. Bagi Al-Afghani, kekuatan sebuah negara adalah jika masyarakatnya mampu menjalankan agamanya dengan baik. Agama dan Negara tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terwujud jika berjalan sendiri-sendiri. Al-Afghani selalu mengingatkan akan bahaya ateisme karena merusak landasan aqidah. Ateisme tidak lebih dari penyangkalan terhadap pencipta karena memiliki pandangan yang salah. *Ateisme* membuat pikiran umat Islam bingung dan hati mereka gelap karena selalu dipenuhi dengan materi yang dapat mendominasi manusia dalam hidup mereka. Selain itu, muncul doktrin ateisme bahwa tubuh manusia hanya diselimuti unsur material yang tidak perlu dibekali dengan kesegaran jiwa.[32]

E. Pemikiran Modernisasi

[31]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam III*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Houve, 1994),h.7.

[32]Maryam Jamilah, *Islam and Orientalism, Terj. Machnun Husein,"Islam dan Orientalisme"* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), h. 69.

Istilah modernisasi atau *ashriyah* (bahasa Arab) diberikan oleh kaum orientalis kepada gerakan Islam di atas tanpa membedakan isi dari gerakan itu sendiri. Modernisasi, dalam masyarakat Barat, menyiratkan pemikiran, arus, gerakan, dan upaya untuk mengubah gagasan, adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya agar sesuai dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ketika umat Islam bersentuhan dengan Barat, modernisasi dari Barat memunculkan ide-ide baru di dunia Muslim, seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan sebagainya.

Adaptasi ajaran ini disebut modern karena dalam sejarahnya agama Katolik dan Protestan diajak untuk menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Sayangnya, modernisasi di Barat ini akhirnya mengarah pada sekularisasi. Jika demikian, ternyata tuturan modern tidak sedikit berdampak dan bahaya dalam memahami agama, bila tidak ada filter tertentu yang menyaringnya, seperti yang terjadi di dunia Barat sebelumnya. Itu sebabnya Harun Nasution mungkin tidak terlalu setuju dengan penggunaan kata modern, jadi dia memilih kata reformasi.

Sebagai penggagas modernisme, Al-Afghani menginginkan sebuah peradaban yang mampu menyaring model-model yang diterapkan oleh Eropa dan Barat, dan tidak mudah untuk meniru kedua model tersebut karena Islam bukanlah ajaran yang dapat diimpor. Modernisme seharusnya tidak hanya lahir dari dunia Barat, tetapi dapat melahirkan modernisme di kalangan Islam. Al-Afghani menginginkan modernisme tidak lahir dari Barat meski banyak yang mengadopsi modernisme Barat, tetapi modernisme lahir dari umat Islam sendiri. Dalam

menjaga peradaban Islam, emperisme dan rasionalisme harus dipegang teguh karena hanya dua pemahaman tersebut yang dapat mendekatkan modernisme dengan ajaran Islam.[33]

Bagi Al-Afghani, wacana untuk mengembangkan modernisme sangat penting untuk diterapkan, mengingat kondisi umat Islam saat ini yang kurang memuaskan, sehingga perlu dilakukan perubahan yang mendasar. Munculnya inferioritas umat Islam merupakan bukti kuat bahwa kolonialisme dan imperialisme Barat masih mendominasi peradaban dunia. Bagi Al-Afghani, gerakan modernisme tidak jauh berbeda dengan furitanisme, yaitu gerakan kembali ke ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi sehingga jika terjadi kontradiksi antara kedua sumber tersebut, maka hal tersebut adalah dianggap sesat dan dapat membahayakan umat Islam.[34]

Modernisme bagi Al-Afghani tidak lebih dari perubahan budaya sebagai hasil dari kemajuan teknologi yang sedang dihadapi. Tantangan besar yang dihadapi umat Islam saat ini adalah mewujudkan kemerdekaan beragama tanpa adanya intervensi dari Barat. Dibutuhkan kedewasaan berfikir agar tidak terjebak dalam postmodernisme. Oleh karena itu, untuk mewujudkan modernisme dalam ajaran Islam, aspek pengamalannya harus diterapkan dalam kehidupan karena Islam bersifat universal dan dapat disesuaikan dengan keadaan.

---

[33]Iqbal, *Reconstruction of Religious Thought in Islam, Terj. Osman Raliby, "Membangun Kembali Alam Pikiran Islam"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)h.6

[34] Abd Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS printing Cemerlang, 2013)h.116

F. Pemerintahan Menurut Jamaluddin Al-Afghani

Al-Afghani menyarankan untuk membentuk pemerintahan demokrasi, sehingga dapat menjalankan berdasarkan konstitusi. Demokrasi kerakyatan yang dimaksud merupakan bentuk perwakilan rakyat dalam menyuarakan segala asprirasi rakyat, yang mana seluruh anggotanya adalah pilihan dari rakyat. Al-Afghani sangat tidak mempercayai pemerintahan yang berada dibawah kekuasaan asing. Hal ini disebabkan karena segala kepentingannya akan berpihak kepada para penguasa buka pada rakyatnya, bahkan kekuasaan dapat dijadikan alat politik dalam mendapakan segala keinginan mereka. Gagasan dalam menjalankan pemerintahan kerakyatan merupakan solusi agar situasi menjadi lebih baik dan dapat melawan kekuasaan absolutisme.

Dari sudut pandang politik, Al-Afghani adalah penentang utama despotisme dan pembela sistem demokrasi yang didukung penuh oleh rakyat. Menurutnya, umat Islam juga perlu belajar dari Barat dengan berbagai hal positif yang bisa diambil. Bagaimanapun, umat Islam harus tetap konsisten dengan ajaran Islam.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN JAMALUDDIN AL-AFGHANI TENTANG PEMERINTAHAN

A. Bentuk Negara dan Pemerintahan Menurut Jamaluddin Al-Afghani

Jamaluddin Al-Afghani memiliki nama lengkap Sayyid Jamal ad-din Al-Afghani bin shafdar Al-Husaini. Ia lahir pada tahun 1838 M di Asadabad, Afghanistan dan meninggal pada tahun 1897 M di Istanbul, Turki. Jamaluddin Al-Afghani ialah seorang tokoh penting dalam pergerakan pembaruan serta kebangkitan Islam pada abad ke-19. Diketahui bahwa Al- Afghani merupakan keturunan Nabi melalui Saidina Ali ra.[35]

Pendidikannya dimulai dari ia sejak kecil, pada saat itu pertama kali ia diajarkan untuk mengkaji Al-Qur'an yang diajarkan oleh ayahnya sendiri. Setelah ia mulai mahir, tahapan selanjutnya yaitu mempelajari bahasa Arab dan Sejarah. Ayahnya begitu memperhatikan pendidikannya, beliau juga mendatangkan seorang guru ilmu Tafsir, ilmu Hadis dan ilmu Fiqh untuk diajarkan kepada Al-Afghani. Kemudian dilengkapi dengan pelajaran-pelajaran lain seperti ilmu Tasawuf dan Ilmu Ketuhanan. Saat Al-Afghani mulai mahir dari berbagai ilmu tersebut, kemudian ia dikirim ke India untuk mempelajari ilmu pengetahuan modern (Eropa).

Dari panjangnya perjalanan yang telah dilalui oleh Al-Afghani, ia menyimpulkan bahwa Islam menghendaki bentuk pemerintahan republik. Sebab

---

[35] Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010)h.57

di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada Undang-undang. Pendapat seperti ini merupakan hal baru di dalam politik Islam yang mana selama ini pemikirannya hanya mengenal bentuk khalifah yang mempunyai kekuasaan yang absolut. Al-Afghani menghendaki bahwa bentuk pemerintahan adalah republik, sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar.[36]

Pendapat ini juga tampaknya dipengaruhi oleh pemikiran Barat, sebab Barat terlebih dahulu mengenal pemerintah republik. Meskipun begitu pemahaman Al-Afghani tidak terlepas dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan juga kenegaraan. Pendapat tersebut lebih maju dari sebelumnya, yang mana Islam tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan yang menyebabkan mereka harus mengikuti masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir. Kemunculan ide yang digagas oleh Al-Afghani juga menimbulkan reaksi berupa kemunduran politis yaitu pemetintahan absolut.

Pemerintahan yang demokratis merupakan salah satu pemerintahan yang memiliki identitas yang paling khas dari pemerintahan yang berbentuk republik. Demokrasi merupakan bentuk pandangan dari sistem pemerintahan republik sebagaimana sistem ini telah berkembang di Barat dan diterapkan oleh Mustafa Kemal Attaturk di Turki sebagai pengganti pemerintahan khalifah.

Awalnya dunia Islam sangat mendominasi dengan pemerintahan yang *absolutisme* dan *otokratisme*. Pemerintahan tersebut menjalankan kekuasaan tanpa

---

[36]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1994)h. 281

adanya kontrol dari konstitusi, sehingga dapat merusak berbagai sistem yang dapat merugikan warga khususnya umat Islam. Pemerintah juga melakukan musyawarah secara tertutup, sehingga dalam setiap kebijakan yang diambil hanya dapat memberikan keuntungan terhadap posisi pemerintah.

Jamaluddin Al-Afghani mengambil banyak pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan berbagai orientasi pemikiran-pemikiran agar lebih baik lagi. Ia memiliki penilaian bahwa setiap negara dapat mempunyai kekuatan yang kokoh apabila seluruh masyarakatnya dapat bersatu. Al-Afghani mengadakan pergerakan revolusi kepada masyarakat serta perombakan terhadap pemerintahan imperialisme dan kolonialisme Barat. Selain itu, ia juga berusaha untuk memperbaiki aqidah seluruh umat Islam yang telah rusak dengan mengajarkan kembali ajaran-ajaran agama Islam yang sebenarnya.

Terdapat beberapa penjelasan di Al-Qur'an tentang bagaimana demokrasi antara lain Q.S Ali-Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka*

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S Ali. Imran : 159)

Ayat di atas menjelaskan seorang hamba selayaknya memiliki hati yang lemah lembut dengan siapapun. Jika mereka memiliki hati dan sikap yang keras terhadap orang lain maka mereka akan sangat rugi, karena orang-orang disekeliling mereka tidak akan merasa nyaman yang pada akhirnya mereka menjauh jika dilakukan secara terus-menerus. Dan ketika seorang hamba disakiti atau tersakiti atas perkataan ataupun perilaku orang lain sebaiknya mereka memiliki hati yang lapang untuk memaafkan. Dan alangkah baiknya jika mereka memohon doa kebaikan kepada orang yang telah menyakiti mereka. Jika suatu permasalahan terjadi sebaiknya mereka melakukan musyawarah untuk menyelesaikannya, dan mengambil keputusan yang terbaik tanpa ada yang merasa dirugikan. Orang-orang yang memiliki hati dan sikap seperti ini seharusnya selalu bertawakal kepada Allah agar mereka selalu mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah swt.

Ayat lain yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang hamba ketika menjadi seorang pemimpin :

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Artin*ya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S Asy-Syura : 38)*

Ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ketika seorang hamba telah memiliki suatu tanggung jawab sikap paling utama yang harus ia miliki adalah mematuhi perintah tuhannya. Seseorang yang takut dan mematuhi perintah tuhannya maka ia tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang buruk untuk dirinya maupun orang lain. Ia harus memiliki sikap adil kepada semua orang dan juga memiliki sikap yang dermawan dalam berbagi. Ketika ia ingin memutuskan sesuatu ia mampu melakukan musyawarah kepada orang-orang disekitarnya agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Penjelasan di atas yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam pemerintahan. Mereka tidak hanya sekedar menjalankan tugas namun juga harus mengerti bagaimana cara-cara yang baik dalam melakukan tugas mereka. Begitu juga halnya dengan demokrasi, demokrasi sendiri memiliki arti sebagai bentuk pemerintahan yang mana warga negaranya memiliki hak-hak dan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka menjadi lebih baik lagi.

Al-Afghani menyarankan untuk membentuk pemerintahan demokrasi, sehingga dapat menjalankan berdasarkan konstitusi. Demokrasi kerakyatan yang dimaksud merupakan bentuk perwakilan rakyat dalam menyuarakan segala asprirasi rakyat, yang mana seluruh anggotanya adalah pilihan dari rakyat. Al-Afghani sangat tidak mempercayai pemerintahan yang berada dibawah kekuasaan asing. Hal ini disebabkan karena segala kepentingannya akan berpihak kepada para penguasa buka pada rakyatnya, bahkan kekuasaan dapat dijadikan alat politik dalam mendapakan segala keinginan mereka. Gagasan dalam menjalankan

pemerintahan kerakyatan merupakan solusi agar situasi menjadi lebih baik dan dapat melawan kekuasaan absolutisme.

Dari sudut pandang politik, Al-Afghani adalah penentang utama despotisme dan pembela sistem demokrasi yang didukung penuh oleh rakyat. Despotisme sendiri merupakan sebuah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran artinya di dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan. Menurutnya, umat Islam juga perlu belajar dari Barat dengan berbagai hal positif yang bisa diambil. Bagaimanapun, umat Islam harus tetap konsisten dengan ajaran Islam.

Al-Afghani pun tidak segan-segan mensosialisasikan gagasan tentang negara republik dan kepala negara yang dipilih rakyat secara demokratis. Karena prinsip seperti ini akan menjadikan musyawarah sebagai pilar penting dalam menjalankan dan melaksanakan sistem pemerintahan yang lebih terbuka. Asas musyawarah itu sendiri akan mampu mencegah penyalahgunaan dari pihak berwenang.

Salah satu kekurangan Al-Afghani adalah gagasan dan reformasinya telah membatasi literatur primer yang dia tulis sendiri. Al-Afghani lebih dikenal melalui tulisan orang lain tentang dirinya yang menafsirkan gagasan dan pemikirannya.

B. Pengaruh dari Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani Terhadap Pemerintahan di Era Modern

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Al-Afghani menyampaikan gagasan berupa Pan-Islamisme. Pada kenyataannya gagasan tersebut sebelumnya pernah disampaikan oleh Usmaniah Muda, akan tetapi sangat kecil pengaruh yang didapat dari bangsa-bangsa yang tidak memahami bahasa Turki. Sedangkan Al-Afgani Menyampaikan tulisannya dengan menerjemahkan ke berbagai bahasa seperti bahasa Arab dan Persia, sehingga para penulis banyak menyebutkan bahwa Al-Afghani merupakan pembaharu internal, yang mana pembaharuan tersebut ditujukan untuk orang-orang Islam terutama.

Ide pembebasan dari tangan Barat merupakan tujuan politik dari Jamaluddin Al-Afghani. Atas ide tersebut Al-Afghani menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Banyak perkataan Al-Afgani dikutip oleh kaum modernis Islam, nasionalis, maupun Islam kontemporer, yang mana mereka sangat mendukung kebebasan seperti itu. Al-Afghani juga menjadi sangat menarik bagi aktifis karena kehidupan politiknya yang begitu luar biasa.

Muslim maupun Barat pernah melakukan kontak dengan Al-Afghani. Penulis barat seperti E.G. Brown dan Wilfrad Blunt membuat tulisan yang isinya membuat pengakuan dan memuji Al-Afgani yang semakin memperkuat posisnya di dunia muslim. Faktanya saat itu Al-Afghani telah banyak menarik perhatian, bahkan ia juga berdebat dengan orang-orang Barat terkemuka yang membuat sosok Al-Afghani semakin dibutuhkan di mata intelektual Muslim.

Pada akhirnya popularitas Al-Afghani yang berkelanjutan terjadi karena ia mulai dipandang berbahaya oleh orang-orang Barat. Namun ada juga penilaian bahwa pengaruh Jamaluddin Al-Afghani lebih berdasarkan pada biografi yang umumnya

mitos dan interpretasi atas gagasan-gagasan yang ia buat. Letak kebesaran dari Jamaluddin Al-Afgani bukaanlah dia sebagai pemikir, walaupun dalam pemikiran itu ia tetap sangat pentingkan karena Al-Afghani menunjukkan pandangannya terhadap masa depan yang jauh dan membaca kemajuan zaman yang sangat tajam.

Albert Hourani memberikan komentar tentang Al-Afgani, ia menyebutkan bahwa Al-Afghani merupakan seorang yang memiliki karangan tidak banyakdikenal tetapi pengaruh dari kepribadiannya dikenal sangat besar. Ide-ide Al-Afghani juga masih memberikan warna pada gerakan kontemporer Islam, seperti Gerakan Kiri Islam yang dimotori oleh Hasan Hanafi.

Pada tahun 1981, Hasan Hanafi menerbitkan jurnalnya yang berjudul *Al-Yasar al-Islamy (Kiri Islam)*, yang mana tulisan tersebut merupakan tanda awal gerakannya. Isi dari jurnal tersebut merupakan kelanjutan dari *Al-Urwah al-Wutsqa* yang pernah diterbitkan oleh Al-Afghani dan Muhammad Abduh sebelumnya. Tujuan dari penulisan jurnal tersebut adalah sebagai semangat untuk berjuan melawan keterbelakangan dan kolonialis, serta berjuang dalam mewujudkan kebebasan, menyatukan dunia Islam dan juga memiliki keadilan sosial. Dengan demikian hal tersebut sangat menjelaskan bahwa ide-ide yang disampaikan oleh Al-Afghani sangat menginspirasi pemikir-pmikir Islam Kontemporer dalam menghadapi berbagai tantangan umat Islam walaupun di dalam situasi dan konteks pada zaman yang telah berbeda.

Al-Afghani yang sebagai aktifis politik, ia lebih hebat di dalam karya-karya lisan seperti pidato dan sebagainya daripada dalam tulisan. Walaupun karya tulisannya

tidak terlalu banyak, namun tetap memiliki pengaruh besar dalam sejarah umat Islam di zaman modern. Al-Afghani menuliskan beberapa karyanya dengan nada pidato yang sangat bersemangat. Dalam tulisan tersebut ia menggambarkan penilaiannya tentang betapa mundurnya keadaan umat Islam dibandingkan dengan orang Eropa.

Tulisan-tulisan yang dibuat oleh Al-Afghani telah tersebar luas dalam penerjemahan bahasa Arab dan Persia yang kemudian menghendaki berbagai gerakan *revolusioner* Islam dalam melawan dan menindas penjajah Barat. Pada dasarnya Al-Afghani mrupakan seorang revolusioner politik, ia juga banyak mengemukakan ide-ide dan kalimat-kalimat yang bersemangat serta ungkapan-ungkapan kunci dengan menggunakan intelektual yang jauh lebih baik.

Muhammad Abduh merupakan murid yang pertama dan yang paling utama dalam menjabarkan pemikiran-pemikiran kunci dari Jamaluddin Al-Afghani. Ini dilakukan Muhammad Abduh setelah ia berpisah dari Al-Afghani atau gurunya tersebut karena akan meninggalkan dunia politik dan beralih kepada bidang keilmuan dan pendidikan.

Dari aktivitas politik dan ide Jamaluddin, sangat akurat. Jamaluddin adalah orang pertama di era Islam modern yang sadar akan bahaya penetrasi Barat dan perpecahan di dunia Islam. Jamaluddin tidak hanya teoritis, tetapi juga mencoba mencari solusi untuk berbagai macam masalah yang dihadapi umat Islam. Gerakan dan ide memberikan inspirasi bagi negara-negara Islam untuk bangkit

dari keterpurukan mereka karena penjajah Barat dan merebut kembali kemerdekaan mereka.

Dalam konteks kontemporer, gagasan Jamaluddin sangat penting dikembangkan untuk menghadapi arena global. Muslim tidak akan bisa maju tanpa persatuan dan kesatuan. Tanpa komitmen persatuan, mereka akan merasa sulit untuk bersaing dengan kekuatan ekonomi dan kemajuan teknologi bangsa lain, terutama bangsa barat. Kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki hanya akan disasar mudah bagi kapitalis modern untuk dikeringkan dan dieksploitasi demi kepentingan Negara maju. Dengan dalih liberalisasi, globalisasi dan ekonomi pasar, pasar bebas dan semua alasan lainnya, kekuatan ekonomi Barat, akan dengan mudah berinvestasi di negara-negara Muslim yang kaya akan sumber daya kekuatan alam. Pada akhirnya yang terjadi adalah penjajahan model baru bangsa Barat terhadap dunia Muslim, yaitu eksploitasi sumber daya alam bangsa Muslim oleh Barat.

Untuk mendapatkan kembali kekuatan pertahanan Umat dan dunia Muslim, kemudian Jamaluddin Al-Afghani menggagas konsep solidaritas komunitas yang dibangun atas dasar persatuan dan persatuan Umat dan dunia Muslim, kemudian berkembang menjadi kesatuan ideologi politik, dalam kerangka persatuan dan keragaman, kemudian diberi label dengan Pan Islamisme.

Gagasan memperbaharui Jamaluddin Al-Afghani dengan Pan-Islamismenya sebagai ideologi politik, mampu menginspirasi umat Islam dan dunia Muslim ke dalam persatuan, bahkan menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam di antara Umat

dan negara-negara Islam. Sebagai bukti nyata, dunia Islam mampu menciptakan lembaga resmi yang terdiri dari negara muslim sebagai wadah diskusi kepentingan Islam dan Dunia Islam seperti OKI, CIC dan lembaga lainnya dianggap relevan dengan zaman dan kebutuhan masyarakat dan Dunia Islam sampai hari ini.

Inti pokok dari penjelasan di bab ini yaitu Jamaluddin Al-Afghani memberikan tanggapan bagaimana bentuk pemerintahan yang pantas untuk umat Muslim. Tidak hanya itu, ia juga banyak memberikan dorongan berupa gagasan-gagasan dalam membentuk pemerintahan agar masyarakan menjadi lebih baik. Ide ataupun gagasan-gagasan yang ia berikan memiliki pengaruh besar untuk seluruh masyarakat dan juga menjadi inspirasi bagi umat Muslim lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jamaluddin Al-Afghani dikenal sebagai seorang pembaharu Islam di Afganistan sejak abad 18. Al-Afghani lahir pada tahun 1839 Masehi di asadabad dan meninggal pada tahun 1897 di Istanbul. Sebagai tokoh reformis, Al-Afghani selalu bercita-cita melakukan perubahan baik dalam sistem ketatanegaraan maupun pemahaman agama dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat Islam. Al-Afghani tidak ingin warganegara tertindas dengan pemerintahan otoriter yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, ia membuat gagasan agar warga negara bisa menemukan ketenangan di negara bagian tersebut.

Sebagai pembaharu dalam Islam, Al-Afghani melihat Islam pada zaman itu menghadapi banyak rintangan dan juga mengahdapi penjajahan Barat yang menginginkan peradaban Islam harus dihentikan. Maka dari itu dibutuhkanlah pembaharuan Islam sebab menurut Al-Afghani Islam merupakan agama di setiap zaman.

Jamaluddin Al-Afghani merupakan seorang refornis dalam pembaharuan pemikiran Islam yang sangat berpengaruh, khususnya di Mesir. Al-Afghani cenderung memiliki sifat sebagai pemimpin politik dibandingkan pemimpin dan pemikir pembaharuan Islam, akan tetapi kegiatan yang dilakukannya berdasarkan kepada ide-ide tentang pembaharuan dalam Islam. Al-Afghani merupakan tokoh yang merintis dalam penafsiran ulang Islam, ia

menekankan kualitas yang diperlukan di duni modern umtuk membebaskan umat Islam dari kebodohan, keterbelakangan serta kemunduran yang dialami umat Islam.

Dalam hal politik sendiri Al-Afghani beranggapan bahwa sistem pemerintahan monarki harus digantikan dengan sistem pemerintahan lain, yaitu menggantikannya dengan sistem pemerintahan republik. Sistem pemerintahan ini memiliki arti yang mana kepemimpina lewat perwakilan rakyat, penguasa juga turut serta tunduk pada undang-undang, memilihi persamaan hak antar laki-laki dengan perempuan, serta kebebasan berpendapat. Semua hal-hal tersebut harus tetap berpegang pada Al-Qur'an, Sunnah dan juga Ijtima'.

Ia selalu menyampaikan sistem musyawarah agar warga bisa memberikan nasehat kepada pemerintah. Menurut Al-Afghani, pemerintahan efektif jika pemerintah selalu bekerja sama dengan masyarakat sehingga terjadi take and give. Mewujudkan keadilan bagi Al-Afghani merupakan harga mati dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa dikendalikan oleh rakyat agar tidak ada pemerintahan yang mutlak. Karena sistem pemerintahan yang tidak diawasi akan mengarah pada pemahaman materi dalam bernegara, akibatnya pemerintah dapat bertindak semena-mena kepada warganya.

Ide dan reformasi Al-Afghani selalu mendapat respon dari kalangan Muslim. Bukan karena keberpihakannya pada mereka, tetapi lebih jauh lagi, Al-Afghani menginginkan umat Islam lebih maju seperti kemajuan Eropa dan Barat. Maka tidak mengherankan jika Al-Afghani menolak keras sistem kafitalisme dengan berbagai cara karena hanya membawa umat Islam pada pemahaman taqlid

yang bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Afghani menginginkan pembaharuan pemikiran dari kalangan umat Islam sehingga ruang Barat dapat dibatasi. Jadi sistem yang diterapkan adalah membuka jalan ijtihad guna mengembangkan ajaran Islam. Untuk mengembalikan kejayaan umat Islam, AlAfghani mengembangkan konsep salafiyah seperti yang diterapkan oleh alkhulafa 'al-rasyidun agar umat Islam kembali pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran dan pandangan terhadap pembaca, secara khusus konsep Pemerintahan menurut Jamaluddin Al-Afghani :

1. Bagi pembaca pada umumnya, hendaknya penulisan skripsi ini dapat menjadi inspirasi dalam membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan konsep pemerintahan yang disampaikan oleh Jamaluddin Al-Afghani.
2. Hendaknya pembaca memahami bagaimana gerakan pembaharuan yang dilakukan Al-Afghani untuk memperbaiki kehidupan umat Islam pada masa itu.
3. Bagi pelajar atau mahasiswa, penulis menyarankan agar memahami bagaimana konsep-konsep pemerintahan di setiap negara, dan juga memahami bagaimana keadaan warga negaranya jika memakai konsep pemerintahan yang benar dan salah.
4. Bagi orang tua, pelajar atau mahasiswa, hendaknya para orang tua dapat mendidik anak-anaknya dengan pengertian baik dan benar sesuai dengan

keyakinan agamanya masing-masing tentang agama sejak dini. Setelah mendidik dengan baik dan benar, orang tua perlu memberikan contoh atau relevansi yang tepat agar para anak dapat memahami secara integral. Atau dengan kata lain, pendidikan tersebut akan dipahami secara teori dan praktiknya, bukan salah satu dari keduanya.

5. Bagi teman-teman seangkatan, hendaknya teman-teman menjadikan skripsi ini sebagai salah satu sarana akan penghayatan tentang sebuah pemerintahan yang telah kita pelajari bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jabiri Mohammed ‘Abed,2003, *Arab-Islamic Philosophy: a Contemporary Critique, Terj. Moch Nur Ichwan, “Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam”*, Yogyakarta : Islamika

Asmuni Yusran, 1998, *Dirasah Islamiah Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaruandalam Dunia Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo persada

Bawazir Tohir, 2015, *Jalan Tengah Demokrasi Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar

Black Anthony, 2001, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi HIngga Kini*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta

Dalimunthe Sehat Sultoni, 2018, *Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Bangunan Islamic Studies*, Yogyakarta : Deepublish

Elwa Mohammed.S, 1983, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Terj. Anshori Thayib,* Surabaya : PT Bina Ilmu

Espotio John L, John D. Donohue,1984, *Islam dan pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta : Rajawali

Gardet Louis, Arkoun M,1997, *Al-Islamul-‘Amsu wa Islamul-Ghad, Terj. Ahsin Mohammad “Islam Kemarin dan Hari Esok”*, Bandung : Pustakan

Hamka, 1996, *Said Djamaluddin Al-Afghani,* Jakarta : Bulan Bintang

Hartono Dick, 1986, *Kamus Populer Filsafat,* Jakarta : Rajawali Press

Hasan K.N. Sofyan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* Surabaya : Penerbit Al-Ikhlas

Hidayat Nuim, Adian Husaini, 2002, *Kajian Politik Islam Liberal, Sejarah, Konsepsi, Penyimpagan dan Jawaban,* Jakarta : Gema Insani Press

Iqbal, 1978, *Reconstruction of Religious Thought in Islam, Terj. Osman Raliby, "Membangun Kembali Alam Pikiran Islam"*, Jakarta : Bulan Bintang

Iqbal Muhammad, Amin Husein Nasution, 2010, *Pemikiran Politik Islam,* Jakarta : Prenada Media Group

Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta : Gaung Persada

Islam Dewan Redaksi Ensiklopedi, 1994, *Ensiklopedi Islam III*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Houve

Jamilah Maryam, 1997, *Islam and Orientalism, Terj. Machnun Husein,"Islam dan Orientalisme"* , Jakarta : Rajawali Grafindo Persada

Majid Nurcholish, 1994, *Ed. Khazanah Intelektual Islam,* Jakarta : Bulan Bintang

Mansur Muhammad Laily, 1994, *Pemikiran Kalam Dalam Islam,* Jakarta : Pustaka Firdaus

Mohammad Herry, 2006, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20,* Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press

Moleong Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya

Nasution Harun, 1975, *Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan,* Jakarta : Bulan Bintang

Ndraha Taliziduhu, 2014, *Metodologi Ilmu Pemerintahan,* Jakarta : PT. Rineka Cipta

Noer Deliar, 1988, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* , Jakarta : Rajawali

Pulungan J. Suyuthi, 2002, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Poerwardaminta.W.J.S., 2010, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Rusli Ris'an, 2018, *Pemikiran Teologi Islam*, Cet. I; Depok : Prenadamedia Grouf

Sirajuddin, 2017, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A.Hajsmy*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sjadzali Munawir, 1993, *Islam dan Tato Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* Jakarta : UI Press

Soebahar Abd Halim,2013, *Modernisasi Pesantren Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren,* Yogyakarta : LKiS printing Cemerlang

Zada Khamami , Mujar Ibnu Syarif , 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* Jakarta : Erlangga